



**PEMERINTAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



Prepared By:
**Bagian Organisasi Setda
Kota Gunungsitoli**

 @pemkogunungsitoli

 gunungsitolikota.go.id

KATA PENGANTAR

✉ diskominfo@gunungsitolikota.go.id

👤 @pemkogunungsitoli

🌐 gunungsitolikota.go.id

Gunungsitoli, 27 Maret 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Gunungsitoli Tahun 2024 merupakan penyampaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024 dalam rangka perwujudan visi Kota Gunungsitoli yaitu "Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, dan Sejahtera". LKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dan menggambarkan capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Selanjutnya pencapaian target kinerja utama tersebut akan menggambarkan progres pembangunan Kota Gunungsitoli yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.

LKIP Tahun 2024 ini, menyajikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan realisasi kinerja berikut efisiensi penggunaan anggaran. Secara umum, rata-rata target kinerja tercapai lebih dari 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi yang ingin dicapai melalui penetapan sasaran strategis secara umum dapat terpenuhi sesuai harapan.

Semoga penyusunan LKIP Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan capaian kinerja dalam rangka mendukung pembangunan Kota Gunungsitoli di masa mendatang serta bermanfaat bagi instansi lain. Terimakasih.

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA'A LAOLI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Susunan Perangkat Daerah

Struktur organisasi Peraturan Kota Gunungsitoli sebagaimana Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Kedua tentang Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli merupakan struktur yang telah dikondisikan sesuai amanat Presiden tentang penyederhanaan birokrasi. Secara total, jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Gunungsitoli sebanyak 34 Perangkat Daerah. Secara lebih jelas, susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Sosial
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19. Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan
20. Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
23. Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Kecamatan Gunungsitoli
30. Kecamatan Gunungsitoli Barat
31. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
32. Kecamatan Gunungsitoli Utara
33. Kecamatan Gunungsitoli Selatan
34. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa

B. Data Kepegawaian

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024, Pegawai Pemerintah Kota Gunungsitoli berjumlah 2.271 Orang, dengan rincian per golongan sebagai berikut:

- Golongan II = 175 orang
- Golongan III = 1.682 orang
- Golongan IV = 414 orang

Bila dibandingkan dengan jumlah PNS pada tahun sebelumnya yang berjumlah 2.335 orang, terjadi penurunan jumlah PNS sebanyak 64 orang. Dari sejumlah 2.271 orang PNS di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024, 60 persen diantaranya perempuan dan 40 persen laki-laki.

Jabatan <i>Occupation</i>	Pegawai Negeri Sipil <i>Government Employee</i>		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama <i>Senior Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya <i>Middle Executives</i>	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama <i>Junior Executives</i>	26	4	30
Administrator/Administrator	95	24	119
Pengawas/Supervisor	91	50	141
Eselon V/5 th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen/Certain Functional Position for Lecturer	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru/Certain Functional for Teacher	222	609	831
Jabatan Fungsional Medis/Certain functional Position for Medical Field	26	244	270
Jabatan Fungsional Teknis/Certain Functional Position for Technical Field	125	84	209
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	395	276	671
Jumlah/Total	980	1.291	2.271

IV. ISU STRATEGIS

Isu strategis Skala Kota Gunungsitoli dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005- 2025, evaluasi terhadap hasil pencapaian dan kinerja dokumen RPJMD periode sebelumnya, serta mencermati situasi kondisi saat ini, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Letak geografis Kota Gunungsitoli yang sangat strategis sebagai pintu masuk Kepulauan Nias;
2. Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kepulauan Nias;
3. Ketersediaan infrastruktur strategis perhubungan laut dan perhubungan udara yang mendukung daya saing daerah;
4. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif cukup tinggi;
5. Potensi ketersediaan lahan produktif yang relatif cukup besar;

6. Sebagai satu-satunya daerah otonom yang berbentuk kota di Kepulauan Nias, memiliki potensi yang sangat besar pada sektor jasa, perdagangan dan industri;
7. Sebagai pusat pendidikan dan kesehatan bagi daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias;
8. Bencana alam dan perubahan iklim global;
9. Arus globalisasi yang berdampak pada degradasi moral generasi muda dan masyarakat pada umumnya.

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pencapaian dan kinerja dokumen RPJMD periode sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang dapat menjadi isu strategis tambahan skala Kota sebagai berikut :

a) Akses masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat serta berkualitas

Kota Gunungsitoli memiliki isu yang cukup serius dengan penyediaan air bersih. Beberapa isu yang perlu diperhatikan Pemerintah yang berkaitan dengan akses air bersih dan lingkungan yang sehat yaitu :

- 1) Rendahnya sarana dan prasarana air bersih serta relatif besarnya cakupan wilayah yang belum teraliri jaringan PDAM sehingga berpotensi menjadi kawasan kekurangan air.
- 2) Masih rendahnya kualitas perumahan yang terjangkau air bersih, sanitasi, serta layak huni dan tidak kumuh.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

b) Pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Berdasarkan data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi perlu adanya optimalisasi potensi sektor unggulan di Kota Gunungsitoli untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan serta berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal.

c) Disparitas Pendapatan

Indeks gini ratio di Kota Gunungsitoli berada dalam klasifikasi rendah serta persebaran penduduk yang masih belum merata. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa sebaran kapasitas SDM belum optimal. Kondisi tersebut sangat memungkinkan menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada level nasional dan provinsi, isu

kesenjangan atau disparitas masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah.

d) Sinergitas Antar Wilayah Kepulauan Nias

Pembangunan daerah memerlukan sinergitas pembangunan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan, atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan, atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kota Gunungsitoli sebagai salah satu daerah otonomi berada pada wilayah kepulauan Nias dimana terdapat 2 daerah Kabupaten yang berbatasan langsung yaitu Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias. Sedangkan daerah Kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Secara geografis, pembangunan berbasis kewilayahan menjadi faktor penting dalam mengelola serta memanfaatkan peluang pembangunan daerah berkesinambungan. Berdasarkan analisa dan kajian dapat dirumuskan beberapa isu terkait perencanaan pembangunan daerah secara simultan yaitu :

- 1) Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah perbatasan;
- 2) Penegakan batas wilayah administratif;
- 3) Pembangunan jalan lingkar (Ring Road) Kepulauan Nias;
- 4) Koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana kewilayahan;
- 5) Pembangunan pariwisata kepulauan Nias;
- 6) Pengembangan jalur transportasi serta moda transportasi lintas Kabupaten/Kota Kepulauan Nias.

Berdasarkan isu di atas, maka pembangunan daerah Kota Gunungsitoli sejatinya tidak hanya memeperhatikan kepentingan sektoral wilayahnya, namun juga tetap memperhatikan sektor dan kepentingan kolektif yang melibatkan pemerintah daerah baik yang berbatasan langsung maupun tidak melalui forum-forum perencanaan serta pengambilan kebijakan di tingkat forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB II PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 dan merupakan tahun ketiga yang bermakna perkembangan pembangunan telah berada di setengah jalan menuju pencapaian target di akhir tahun RPJMD.

Didasarkan pada visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli yang telah dilantik dan mempedomani arah Pembangunan dokumen Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli 2005-2025, maka visi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 adalah : “ **Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, Dan Sejahtera**”

Pengertian makna kata yang terkandung dalam visi dijelaskan sebagai berikut :
Kota Gunungsitoli : Meliputi seluruh wilayah administrasi dan masyarakat kota Gunungsitoli yang terbentuk berdasarkan Undang– Undang Nomor 47 Tahun 2008.
Berdaya Saing : Kapabilitas pemerintahan dan masyarakat Kota Gunungsitoli yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi persaingan, menciptakan kesetaraan dan merespon dinamika tuntutan pembangunan daerah.
Nyaman : Kota Gunungsitoli yang menjadi rumah bagi semua kalangan sebagai kota yang ramah, bersih, berbudaya dan tenteram dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta sistem perkotaan dan tata lingkungan yang terintegrasi.
Sejahtera : Masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara layak melalui peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya penduduk miskin.

Perwujudan visi ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Adapun Misi Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul.
2. Memperkuat perekonomian yang berbasis sumber daya lokal.
3. Membangun infrastruktur yang berkeadilan dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis elektronik.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius dan taat hukum.

II. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	80,60
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,03 Tahun
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	89,51%
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Unggulan	1. PDRB Per Kapita	Rp. 51.050
		2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	15,17%
		3. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	3,19%
		4. Nilai Investasi	19 Miliar
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,09%
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	12,81%
6	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	36,92%
7	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,6202
8	Meningkatnya Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	1. Persentase Jalan Kondisi Baik	33,06%
		2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	65%
		3. Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	99,01%
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,83%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
10	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	1. Persentase Bencana Yang Tertangani	100%
		2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	74,87%
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60,00
		2. Nilai SAKIP	B
		3. Indeks Profesionalitas ASN	58,00
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	80,00%
13	Meningkatnya Digitalisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,46
14	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	68,93%
15	Terciptanya Masyarakat Yang Berkarakter Berbasis Nilai Budaya Lokal	Indeks Budaya Lokal	58,25%

III. RENCANA ANGGARAN

APBD Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 774.508.269.021 dan belanja sebesar Rp. 736.472.621.463.

Komposisi APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pagu anggaran pada Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 769.383.217.929 dan teralisasi sebesar Rp 739.376.035.908 atau tercapai sebesar 96,10% dari target yang telah ditetapkan. Komponen Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 46.971.727.675 dan teralisasi sebesar Rp 23.906.167.796 atau tercapai sebesar 50,89%.
- 2) Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 709.427.071.536 dan teralisasi sebesar Rp 703.441.933.340 atau tercapai sebesar 99,16%.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target anggaran sebesar Rp 12.984.418.717 dan teralisasi sebesar Rp 12.027.934.772 atau tercapai sebesar 92,63%.

Komponen Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2024 tidak lagi mengenal Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019. Komponen Belanja APBD Perubahan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Belanja Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 517.064.601.373 dan terealisasi sebesar Rp 481.835.639.087 atau tercapai sebesar 93,19%.
- 2) Belanja Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 124.100.532.042 dan terealisasi sebesar Rp 122.329.502.180 atau tercapai sebesar 98,57%.
- 3) Belanja Tidak Terduga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 0.
- 4) Belanja Transfer dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 133.243.135.605 dan terealisasi sebesar Rp 132.307.480.196 atau tercapai sebesar 99,30%.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Berdasarkan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, tertanggal 4 Maret 2021 disampaikan dalam nomor 1 (satu), huruf (a) maka, terhitung sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi tidak menyusun laporan kinerja (LKj) tersendiri karena laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota/provinsi disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Pemerintah Kota Gunungsitoli mempunyai 15 Sasaran dan 24 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2023. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikelompokkan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang. Sesuai dengan kebutuhan di Pemerintah Kota Gunungsitoli, urusan-urusan Pemerintahan tersebut dikelompokkan lagi sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026.

Berdasarkan pengelompokkan tersebut disusunlah target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli. Target capaian kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024, telah disusun dalam dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	80,60
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,03 Tahun
3	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	89,51%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
4	Meningkatnya Perekonomian Unggulan Aktivitas Sektor	6. PDRB Per Kapita	Rp. 51.050
		7. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	15,17%
		8. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	3,19%
		9. Nilai Investasi	19 Miliar
		10. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,09%
5	Menurunnya Penduduk Miskin Jumlah	Persentase Penduduk Miskin	12,81%
6	Menurunnya Kesejahteraan Sosial Masalah	Persentase PMKS yang Tertangani	36,92%
7	Meningkatnya Desa Kemandirian	Indeks Desa Membangun	0,6202
8	Meningkatnya Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Infrastruktur	4. Persentase Jalan Kondisi Baik	33,06%
		5. Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	65%
		6. Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	99,01%
9	Meningkatnya Lingkungan Hidup Kualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,83%
10	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana Kemampuan	3. Persentase Bencana Yang Tertangani	100%
		4. Cakupan Pelayanan Kebakaran Kab/Kota	74,87%
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60,00
		5. Nilai SAKIP	B
		6. Indeks Profesionalitas ASN	58,00
12	Meningkatnya Layanan Publik Kualitas	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	80,00%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
13	Meningkatnya Digitalisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,46
14	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	68,93%
15	Terciptanya Masyarakat Yang Berkarakter Berbasis Nilai Budaya Lokal	Indeks Budaya Lokal	58,25%

A. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Keberhasilan Visi dan Misi Pembangunan di Kota Gunungsitoli sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli 2021 – 2026 diukur dengan menggunakan tolok ukur beserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja. Potret kinerja daerah tercermin dari capaian lima belas sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, serta beberapa capaian pembangunan berupa Inovasi dan Pelayanan Publik.

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Kota Gunungsitoli Tahun 2024 Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
			TARGET	REALISASI	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pendidikan	Nilai	80,60	93,20	115,6%
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,03 Tahun	74,23 Tahun	103,05%
3	Indeks Pembangunan Gender	Persen	89,51%	89,92%	100,45%
4	PDRB Per Kapita	Rupiah	Rp. 51.050	Rp 50.410	98,74%
5	Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	15,17%	14,45%	95,25%
6	Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	Persen	3,19%	4,70%	147,3%
7	Nilai Investasi	Rupiah	19 Miliar	47.798.669.296 Miliar	247%

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
			TARGET	REALISASI	% Capaian
1	2	3	4	5	6
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,09%	3,30%	93,63%
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,81%	17,72%	72,29%
10	Persentase PMKS Yang Tertangani	Persen	36,92%	83%	112,40%
11	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6202	0,6470	104%
12	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	33,06%	58,78%	177%
13	Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	Persen	65%	50,76%	78,09%
14	Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	Persen	99,01%	98,89%	99,87%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	54,83%	65,37%	119,22%
16	Persentase Bencana Yang Tertangani	Persen	100%	100%	100%
17	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	Persen	74,87%	74,40%	99,37%
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	60,00	78,26	130%
19	Nilai SAKIP	Nilai	B	CC	90%
20	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	58,00	74,78	129%
21	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	Persen	80,00%	100%	125%
22	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,46	2,23	90,65%
23	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Persen	68,93%	85%	123%
24	Indeks Budaya Lokal	Persen	58,25%	67,87%	116,51%

Dari tabel di atas terlihat capaian indikator Pemerintah Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 15 indikator atau sebesar 62,5% (dengan capaian > 100%), terdapat 1 indikator dengan capaian tepat 100%, dan 8 indikator dengan capaian < 100% dari total 24 indikator kinerja Wali Kota.

Adapun 8 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Persentase ketersediaan fasilitas sarana perhubungan, Persentase kawasan non kumuh perkotaan, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota, Nilai SAKIP, dan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator yang memiliki capaian tepat 100% dengan target pada Perjanjian Kinerja yaitu Persentase Bencana Yang Tertangani. Sedangkan indikator dengan capaian > 100% yaitu Indeks Pendidikan, Umur Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender, PDRB Perkapita, Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Perdagangan, Nilai Investasi, Persentase PMKS yang tertangani, Indeks Desa Membangun, Persentase Jalan Kondisi Baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase bencana yang tertangani, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks profesionalitas ASN, Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM Baik, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, dan Indeks Budaya Lokal.

Informasi lebih lengkap terhadap ketercapaian masing-masing indikator akan diuraikan secara lebih lanjut dalam sub bab Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi Yang Telah Dilakukan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam tabel, sebanyak 4 indikator kinerja mengalami penurunan capaian, 5 indikator memiliki laju peningkatan capaian yang tetap atau 0%, dan 15 indikator memiliki laju peningkatan capaian kinerja > 100%.

Tabel 3.3
Matriks Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Selisih Kinerja	% Selisih Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pendidikan	Nilai	84,65	93,20	8,55	10,10%
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,03 Tahun	74,23	0,2	0,27%
3	Indeks Pembangunan Gender	Persen	89,69%	89,92%	0,23	0,25%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Selisih Kinerja	% Selisih Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
4	PDRB Per Kapita	Rupiah	Rp. 48.460	Rp 50.410	1.950	4,02%
5	Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	Persen	14,60%	14,45%	-015	-1,02%
6	Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	Persen	4,18%	4,70%	0,52	12,44%
7	Nilai Investasi	Rupiah	94 Miliar	47.798.669.296 Miliar	-46.201.330.704	-96,65%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,67%	3,30%	0,37	10,08%
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,78%	17,72%	-2,94	-19,89%
10	Persentase PMKS Yang Tertangani	Persen	87,75%	83%	-4,75	-5,41%
11	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6271	0,6470	0,01	1,59%
12	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	50,96%	58,78%	7,82	15,34%
13	Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	Persen	50,26%	50,76%	0,5	0,99%
14	Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	Persen	98,89%	98,89%	0	0%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	60,25%	65,37%	5,12	8,49%
16	Persentase Bencana Yang Tertangani	Persen	100%	100%	0	0%
17	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	Persen	73,81%	74,40%	0,59	0,79%
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	76,57	78,26	1,69	2,2%
19	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	0	0%
20	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	59,49	74,78	15,29	25,70%
21	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	Persen	100%	100%	0	0%
22	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,13	2,23	0,1	4,69%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Selisih Kinerja	% Selisih Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
23	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Persen	74%	85%	11	14,86%
24	Indeks Budaya Lokal	Persen	67,78%	67,87%	0	0%

C. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam hal untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2021-2026 telah mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berupa indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 (Sasaran Daerah) yang telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan Kota Gunungsitoli. Capaian Indikator Kinerja Daerah yang merupakan ukuran terhadap keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Matriks Capaian Kinerja Indikator Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target RPJMD 2021-2026

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Pendidikan	Nilai	80,60	93,20	115,6%	80,60
2	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,03 Tahun	74,23 Tahun	103,05%	72,03 Tahun
3	Indeks Pembangunan Gender	Persen	89,51%	89,92%	100,45%	89,51%
4	PDRB Per Kapita	Rupiah	Rp. 51.050	Rp 50.410	98,74%	Rp. 51.050
5	Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan	Persen	15,17%	14,45%	95,25%	15,17%

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
	perikanan					
6	Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	Persen	3,19%	4,70%	147,3%	3,19%
7	Nilai Investasi	Rupiah	19 Miliar	47.798.669.296 Miliar	247%	19 Miliar
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,09%	3,30%	93,63%	3,09%
9	Persentase Penduduk Miskin	Persen	12,81%	17,72%	72,29%	12,81%
10	Persentase PMKS Yang Tertangani	Persen	36,92%	83%	112,40%	36,92%
11	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,6202	0,6470	104%	0,6202
12	Persentase Jalan Kondisi Baik	Persen	33,06%	58,78%	177%	33,06%
13	Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	Persen	65%	50,76%	78,09%	65%
14	Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	Persen	99,01%	98,89%	99,87%	99,01%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	54,83%	65,37%	119,22%	54,83%
16	Persentase Bencana Yang Tertangani	Persen	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kab/Kota	Persen	74,87%	74,40%	99,37%	74,87%
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	60,00	78,26	130%	60,00
19	Nilai SAKIP	Nilai	B	CC	90%	B
20	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	58,00	74,78	129%	58,00
21	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	Persen	80,00%	100%	125%	80,00%
22	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,46	2,23	90,65%	2,46
23	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Persen	68,93%	85%	123%	68,93%
24	Indeks Budaya Lokal	Persen	58,25%	67,87%	116,51%	58,25%

Dari tabel di atas, capaian target indikator kinerja pada Tahun 2024 terhadap target indikator kinerja pada RPJMD 2021-2026 terdapat 8 indikator atau sebesar 33% target yang ditetapkan pada tahun 2024 belum tercapai realisasinya. Selanjutnya, capaian pada tahun 2024 terdapat 1 indikator kinerja (4,16%) dengan capaian tepat

100% dan 15 indikator (62,5%) memiliki capaian kinerja melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026.

Adapun 8 indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Persentase ketersediaan fasilitas sarana perhubungan, Persentase kawasan non kumuh perkotaan, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota, Nilai SAKIP, dan Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator yang memiliki capaian tepat 100% dengan target pada Perjanjian Kinerja yaitu Persentase Bencana Yang Tertangani. Sedangkan indikator dengan capaian > 100% yaitu Indeks Pendidikan, Umur Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Gender, PDRB Perkapita, Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Perdagangan, Nilai Investasi, Persentase PMKS yang tertangani, Indeks Desa Membangun, Persentase Jalan Kondisi Baik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase bencana yang tertangani, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks profesionalitas ASN, Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM Baik, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, dan Indeks Budaya Lokal.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif/ Solusi Yang Telah Dilakukan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Dokumen RPJMD Kota Gunungsitoli memuat 15 Sasaran Daerah yang diukur kinerjanya menggunakan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah Kota Gunungsitoli beserta Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan

penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Pendidikan	80,60	93,20	115,6%

RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026 memuat visi “Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, dan Sejahtera”. Untuk mewujudkannya, visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) misi. Misi pertama pembangunan daerah yaitu: Membangun sumber daya manusia yang unggul yang bertujuan untuk Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi pertama tersebut yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul adalah Indeks Pendidikan.

Capaian kinerja sasaran daerah meningkatnya kualitas dan akses pelayanan Pendidikan yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pendidikan sebagaimana disampaikan pada tabel di atas pada tahun 2024 berada pada kriteria “Tinggi”, bila dibandingkan dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Gunungsitoli. Dalam merumuskan Indeks Pendidikan, variabel yang digunakan terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu:

- a. Rata-rata lama sekolah;

- b. Nilai rata-rata UN SD/ nilai lain yang disetarakan;
- c. Nilai rata-rata UN SMP/ nilai lain yang disetarakan;
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat;
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat;
- f. Rasio ruang kelas kategori baik SD; dan
- g. Rasio ruang kelas kategori baik SMP.

Untuk melakukan perhitungan Indeks Pendidikan, dilakukan perbandingan antara 7 variabel dimaksud dengan target nasional sebagaimana tabel berikut:

No	Indikator	Target	Capaian 2024
1	Rata-Rata Lama Sekolah	8,94	8,76
2	Nilai Rata-Rata UN SD/ Nilai lain yang disetarakan	84,84	82,66
3	Nilai Rata-Rata UN SMP/ Nilai lain yang disetarakan	72,20	84,69
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	94,86	98,08
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	85,46	80,26
6	Rasio Ruang Kelas Kategori Baik SD	84,23	91,68
7	Rasio Ruang Kelas Kategori Baik SMP	70,45	85,17

Berdasarkan tabel di atas, rumus untuk menghitung nilai Indeks Pendidikan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Pendidikan} &= ((\text{Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)}/\text{Target Nasional} \times 100) + (\text{APM} \\
 &\quad \text{SD}/\text{Target Nasional} \times 100) + (\text{APM SMP}/\text{Target Nasional} \times 100) \\
 &\quad + (\text{Rasio Ruang Kelas Kategori Baik SD}/\text{Target Nasional} \times 100) \\
 &\quad + (\text{Rasio Ruang Kelas Kategori Baik SMP}/\text{Target Nasional} \times \\
 &\quad 100) + (\text{Nilai Rata-Rata UN SD atau Nilai Lain Yang} \\
 &\quad \text{Disetarakan}/\text{Target Nasional} \times 100) + (\text{Nilai Rata-Rata UN SMP} \\
 &\quad \text{atau Nilai Lain Yang Disetarakan}/\text{Target Nasional} \times 100)) / 7 \\
 &= \frac{(8,76 \times 100)}{12,39} + \frac{(82,66 \times 100)}{90} + \frac{(84,69 \times 100)}{90} + \frac{(98,08 \times 100)}{100} + \frac{(80,26 \times 100)}{100} + \frac{(91,68 \times 100)}{100} + \frac{(85,17 \times 100)}{100} \\
 &= \mathbf{93,20}
 \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan tercapai dengan baik. Hal ini dilihat dari indikator Indeks Pendidikan yang terealisasi sebesar 93,20% dari target 80,60% atau nilai capaian 115,6%.

- 1) **Rata-rata Lama Sekolah** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dimana target untuk indikator ini sebesar 8,94. Berdasarkan Surat BPS Kota Gunungsitoli nomor B-0069/1278/PK.320.01/2025, rata-rata lama sekolah di kota Gunungsitoli untuk tahun 2024 sebesar **8,76**.
- 2) **Harapan Lama Sekolah** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dimana untuk indikator ini sebesar **13,82**. Berdasarkan Data BPS Kota Gunungsitoli, harapan lama sekolah di Kota Gunungsitoli untuk tahun 2024 sebesar **13,79**.
- 3) **Nilai rata-rata ujian nasional SD/nilai yang disetarakan** yaitu nilai yang diperoleh oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan rata-rata hasil ujian mata pelajaran dibagi dengan banyaknya jumlah mata pelajaran yang diujikan, dimana target untuk indikator ini sebesar **84,84**. Untuk menghitung indikator ini, data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2024, dimana pada jenjang Sekolah Dasar, jumlah rata-rata hasil ujian mata pelajaran meliputi :

No.	MATA PELAJARAN	Rata-rata Nilai
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	84,92
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	83,55
3	Bahasa Indonesia	82,42
4	Matematika	80,40
5	Ilmu Pengetahuan Alam	82,87
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	82,69
7	Seni Budaya dan Prakarya	82,93
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	82,64
9	Bahasa Nias	82,40
10	Bahasa Inggris	81,12
	Nilai rata-rata	82,66

Dengan melihat hasil capaian pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target pada indikator ini **tidak tercapai**.

4) **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP** adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, dimana target pada indikator ini sebesar 85,46%.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, perhitungan Angka Partisipasi Murni menggunakan rumus :

$$APM \text{ SMP} = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 13 – 15 Tahun Pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, bahwa jumlah siswa usia 13-15 Tahun pada jenjang SMP/MTs sebanyak **7.100 orang**, sedangkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kota Gunungsitoli sebanyak **8.846 Orang**. Berdasarkan data tersebut, maka diperoleh nilai APM SMP sebesar 80,26%, sehingga target indikator **tidak tercapai**.

5) **Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD** adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, dimana target pada indikator ini sebesar **100%**. Pada jenjang PAUD, perhitungan Angka Partisipasi Murni menggunakan rumus :

APM PAUD

$$= \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 3 – 6 Tahun Pada jenjang PAUD/TK}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3 – 6 Tahun}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, bahwa jumlah siswa usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD sebanyak 4.166 orang, sedangkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun di Kota Gunungsitoli sebanyak 13.572 Orang. Berdasarkan data tersebut APM PAUD sebesar 30,29% sehingga target indikator tidak tercapai.

6) **Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan** adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, dimana target pada indikator ini sebesar **100%**. Pada jenjang Pendidikan Kesetaraan, perhitungan Angka Partisipasi Murni menggunakan rumus :

APM Kesetaraan

$$= \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 18 Tahun}} \times 100\%$$

Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024, jumlah siswa usia 7-18 tahun pada jenjang Pendidikan kesetaraan sebanyak **1.534 orang**, dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-18 tahun sebanyak **5.187 orang**. Dapat dijelaskan bahwa kelompok usia 7-18 tahun adalah jumlah penduduk yang belum mengikuti sekolah

formal baik jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA sehingga, dapat diperoleh nilai APM Pendidikan Kesetaraan sebesar **29,57 %**. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di seluruh Kecamatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Umur Harapan Hidup	72,03 Tahun	74,23 Tahun	103,05%

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada khususnya digunakan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH (*Expectation of Life/EO*) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Peningkatan UHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan UHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat, dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat masyarakat.

Sasaran untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2024, dari target 72,03 tahun, realisasi tahun 2024 menunjukkan bahwa umur harapan hidup penduduk Kota Gunungsitoli mencapai 74,23 tahun atau 103,05% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi.

Salah satu faktor pencetus rendahnya Umur Harapan Hidup (UHH) di suatu daerah adalah tingginya angka kematian anak, sehingga Dinas Kesehatan berupaya menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan mendorong kualitas hidup usia lanjut melalui peningkatan pelayanan kesehatan.

Gambaran Trend Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Gunungsitoli dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :

Grafik 3.1.
Pencapaian Indikator Kinerja
Umur Harapan Hidup (UHH)



Pada Tahun 2024 target indikator kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) yakni 72,03 Tahun. Menentukan Umur Harapan Hidup (UHH) KotaGunungsitoli masih menggunakan data yang telah dianalisis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gunungsitoli setiap tahunnya dan untuk Tahun 2024 pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Gunungsitoli yakni 74,23 Tahun.

Bila dibandingkan pencapaian pada Tahun 2023, capaian indikator Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Gunungsitoli adalah 74,03 Tahun, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup (UHH) pada Tahun 2024 telah menunjukkan peningkatan hasil capaian kinerja, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) yakni dengan peningkatan mutu layanan kesehatan, akses pelayanan kesehatan, pemerataan akses pelayanan, standarisasi layanan kesehatan, penguatan sistem rujukan, serta pelibatan pemangku kepentingan dan lintas sektor dalam penyelenggaraan program kesehatan, selain itu dapat dilakukan juga dengan meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan setiap masyarakat agar dapat berperilaku hidup sehat, bagi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Capaian umur harapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat pembangunan kesehatan disuatu wilayah. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan kesehatan dinilai dari

menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu satu tahun.

Angka Kematian Ibu (AKI) menerangkan tentang jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan pasca persalinan per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada kurun waktu tertentu.

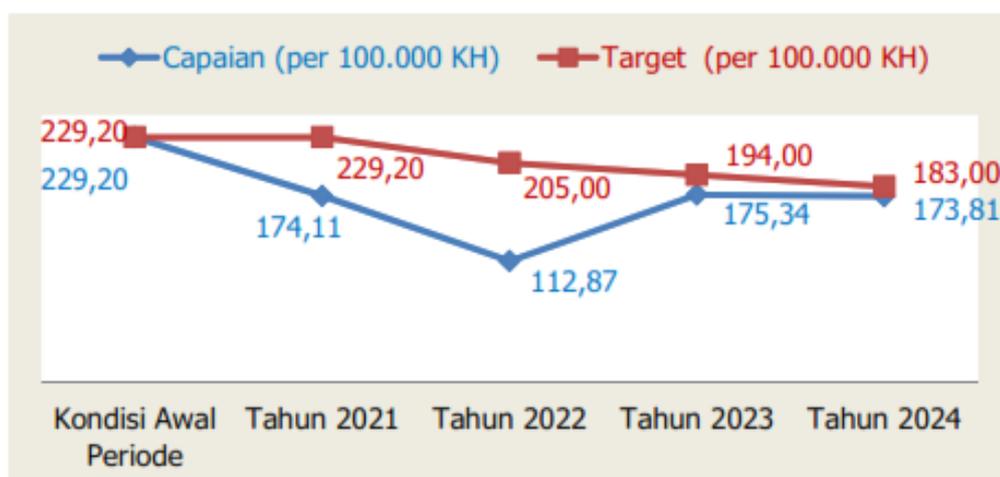
Pada Tahun 2024 di Kota Gunungsitoli, jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas yang ditemukan sebanyak 3 (tiga) kasus kematian ibu, sedangkan jumlah sasaran kelahiran hidup selama Tahun 2024 sebanyak 1.726 orang, sehingga dengan demikian capaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 adalah 173,81 per 100.000 KH.

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja ini telah tercapai dengan menunjukkan capaian kinerja tidak melewati ambang batas maksimal target yang telah ditetapkan yakni 183,00 per 100.000 KH.

Namun demikian, bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2023 yakni sebesar 175,34 per 100.000 KH, maka pencapaian indikator kinerja ini menggambarkan adanya penurunan kasus dari tahun sebelumnya. Sehingga, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dapat memberikan dan melaksanakan program kegiatan yang terfokus dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Gunungsitoli pada tahun – tahun mendatang.

Berikut gambaran trend pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI), sebagai berikut :

Grafik 3.2.
Pencapaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI)



Ditemukannya kasus kematian ibu pada Tahun 2024 yakni sebanyak 3 (tiga) kasus disebabkan terjadinya perdarahan post partum dan masalah kesehatan ibu pasca melahirkan.

Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, perawatan selama kehamilan, dan tanda-tanda bahaya selama kehamilan maupun persalinan dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan tindakan medis yang diperlukan.
- 2) Fasilitas kesehatan yang tidak memadai atau tidak memiliki fasilitas lengkap serta kurangnya tenaga medis yang terlatih untuk menangani komplikasi kehamilan dan persalinan yang bisa meningkatkan resiko kematian ibu.
- 3) Penyakit seperti preeklampsia, perdarahan postpartum, infeksi, dan komplikasi lainnya sering menjadi penyebab kematian ibu. Penanganan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dapat memperburuk kondisi ibu hamil.
- 4) Dukungan yang rendah dari keluarga atau komunitas bisa menghambat ibu hamil untuk memperoleh perawatan kesehatan yang tepat atau untuk melakukan langkah pencegahan.
- 5) Laporan layanan ibu hamil dari fasyankes swasta yang belum terintegrasi dengan puskesmas, disebabkan oleh karena koordinasi pelayanan ibu hamil dengan fasyankes swasta belum terintegrasi dengan baik dan belum tertibnya pencatatan dan pelaporan dari fasyankes swasta.

Adapun beberapa upaya – upaya dan solusi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Gunungsitoli, yakni sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan;
- 2) Melakukan kampanye kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin (antenatal care/ANC), persalinan difasilitas kesehatan, dan pencegahan komplikasi;
- 3) Mendorong ibu hamil untuk melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan (ANC) selama masa kehamilan;
- 4) Mengidentifikasi dan memantau kehamilan risiko tinggi (seperti anemia, hipertensi, atau diabetes) secara intensif;

- 5) Memastikan adanya sistem rujukan yang cepat dan efisien dari puskesmas ke rumah sakit untuk kasus-kasus komplikasi kehamilan dan persalinan;
 - 6) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani komplikasi seperti pendarahan pasca persalinan, preeklampsia, dan infeksi;
 - 7) Memperkuat system informasi kesehatan untuk memantau dan melaporkan kasus kematian ibu secara real time;
 - 8) Melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidik, sosial, dan agama dalam upaya menurunkan AKI;
 - 9) Melibatkan kader kesehatan masyarakat dalam memantau kesehatan ibu hamil dan memberikan edukasi;
 - 10) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang selama kehamilan untuk mencegah komplikasi seperti anemia dan kekurangan energi kronis (KEK);
 - 11) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan program kesehatan ibu dan anak.
- b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal) untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan kesehatan dinilai dari menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu satu tahun.

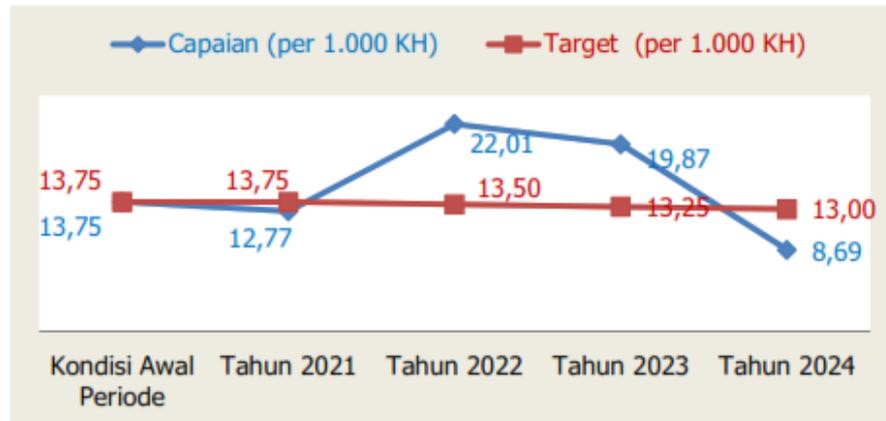
Pada Tahun 2024 di Kota Gunungsitoli, jumlah kematian bayi 0-11 bulan (termasuk neonatal) yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) kasus kematian bayi, sedangkan jumlah sasaran kelahiran hidup selama Tahun 2024 sebanyak 1.726 orang, sehingga dengan demikian capaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 adalah 8,69 per 1.000 KH.

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja ini tidak tercapai dengan menunjukkan capaian kinerja melewati ambang batas maksimal target yang telah ditetapkan yakni 13,00 per 1.000 KH.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2023 yakni sebesar 19,87 per 1.000 KH, maka pencapaian indikator kinerja ini menggambarkan adanya penurunan kasus dari tahun sebelumnya. Sehingga, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dapat memberikan dan melaksanakan program kegiatan yang terfokus dalam menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Gunungsitoli pada tahun – tahun mendatang.

Berikut gambaran trend pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Bayi (AKB), sebagai berikut :

Grafik 3.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Angka Kematian Bayi (AKB)



Ditemukannya kasus kematian bayi pada Tahun 2024 yakni sebanyak 15 (lima belas) kasus, disebabkan oleh beberapa masalah kesehatan pada bayi seperti asfiksia lahir (kekurangan oksigen), kelahiran prematur, infeksi bakteri atau virus seperti sepsis dan pneumonia, cacat lahir seperti kelainan jantung bawaan, spina bifida, atau kelainan genetic serta berat badan lahir rendah.

Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

- 1) Fasilitas kesehatan yang tidak memadai atau tidak memiliki fasilitas lengkap serta kurangnya tenaga medis yang terlatih untuk menangani masalah kesehatan pada bayi yang bisa meningkatkan resiko kematian;
- 2) Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perawatan prenatal dan postnatal;
- 3) Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai dalam menangani komplikasi kehamilan dan persalinan;
- 4) Kurangnya asupan gizi yang memadai selama kehamilan serta kurangnya pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI yang bergizi;
- 5) Tingginya angka infeksi pada bayi baru lahir, seperti sepsis dan pneumonia serta penyebaran penyakit menular yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi;
- 6) Kurangnya data yang akurat untuk mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi program kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir;

- 7) Terdapat sejumlah keluarga yang belum teredukasi tentang pentingnya layanan ANC, disebabkan oleh karena tingkat pengetahuan dan pemahaman keluarga yang masih minim masalah kehamilan;
- 8) Laporan layanan ibu hamil dan bayi baru lahir dari fasyankes swasta yang belum terintegrasi dengan puskesmas, disebabkan oleh karena koordinasi pelayanan ibu hamil dengan fasyankes swasta belum terintegrasi dengan baik dan belum tertibnya pencatatan dan pelaporan dari fanyankes swasta.

Adapun beberapa upaya – upaya dan solusi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Gunungsitoli, yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan cakupan dan kualitas pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, termasuk pemeriksaan laboratorium dasar dan USG;
- 2) Memastikan semua persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih difasilitas kesehatan yang memadai;
- 3) Meningkatkan kunjungan pasca persalinan untuk memantau kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
- 4) Pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dengan memastikan adanya fasilitas kesehatan yang memadai di setiap wilayah;
- 5) Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi dalam penanganan ibu hamil dan bayi baru lahir;
- 6) Melakukan penyuluhan tentang pentingnya perawatan kehamilan, persalinan yang aman, dan perawatan bayi baru lahir;
- 7) Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap untuk bayi, termasuk imunisasi Hepatitis B, BCG, DPT-HB-Hib, Polio, dan Campak.
- 8) Memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan menyusui, serta pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan;
- 9) Melatih kader kesehatan di masyarakat untuk membantu dalam deteksi dini risiko kehamilan dan persalinan;
- 10) Melakukan audit maternal dan perinatal untuk mengidentifikasi penyebab kematian bayi dan mengambil langkah perbaikan;
- 11) Meningkatkan sistem pelaporan dan analisis data kematian bayi untuk mengambil kebijakan yang tepat;
- 12) Memastikan adanya dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah.

c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian Balita (AKABA) menggambarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dinilai dari menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) di wilayah Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu satu tahun.

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah kematian balita usia 0 – 59 bulan (termasuk kematian bayi) untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Pada Tahun 2024 di Kota Gunungsitoli, jumlah kematian balita usia 0-59 bulan (termasuk kematian bayi) yang ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus kematian balita, sedangkan jumlah sasaran balita, sedangkan jumlah sasaran balita pada tahun 2024 sebanyak 10.077 balita, sehingga dengan demikian capaian indikator kinerja Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 adalah 1,69 per 1.000 Balita.

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja ini tidak tercapai dengan menunjukkan capaian kinerja melewati ambang batas maksimal target yang telah ditetapkan yakni 2,66 per 1.000 KH.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Balita (AKABA) pada Tahun 2023 yakni sebesar 3,40 per 1.000 Balita, maka pencapaian indikator kinerja ini menggambarkan adanya peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. Sehingga, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dapat meningkatkan pelaksanaan program kegiatan yang terfokus dalam menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Gunungsitoli pada tahun – tahun mendatang.

Berikut gambaran trend pencapaian indikator kinerja Angka Kematian Balita (AKABA), sebagai berikut :

Grafik 3.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Angka Kematian Balita (AKABA)



Ditemukannya kasus kematian balita pada Tahun 2024 yakni sebanyak 17 (tujuh belas) kasus disebabkan oleh beberapa masalah kesehatan pada bayi seperti asfiksia lahir (kekurangan oksigen), bayi yang lahir prematur sering mengalami komplikasi kesehatan seperti gangguan pernapasan dan infeksi.

Adapun permasalahan yang dapat disimpulkan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024, yakni sebagai berikut :

- 1) Fasilitas kesehatan yang tidak memadai atau tidak memiliki fasilitas lengkap serta kurangnya tenaga medis yang terlatih untuk menangani masalah kesehatan pada balita yang bisa meningkatkan resiko kematian;
- 2) Kurangnya asupan gizi yang cukup, baik karena kemiskinan maupun kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang;
- 3) Kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang memadai, yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare dan infeksi lainnya;
- 4) Cakupan imunisasi yang tidak merata atau rendah, sehingga balita rentan terhadap penyakit yang sebenarnya dapat dicegah;
- 5) Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perawatan balita yang baik, termasuk pemberian ASI eksklusif, imunisasi, dan pencegahan penyakit;
- 6) Kualitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai, termasuk kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan fasilitas yang tidak memenuhi standar.

Adapun beberapa upaya – upaya dan solusi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dalam rangka menurunkan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Gunungsitoli, yakni sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan cakupan posyandu dengan melengkapi fasilitas, tenaga kesehatan, dan edukasi kepada kader;
- 2) Memastikan cakupan imunisasi lengkap bagi balita, termasuk vaksinasi tambahan seperti PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine) dan rotavirus;
- 3) Memberikan makanan tambahan bergizi untuk balita dari keluarga kurang mampu;
- 4) Memastikan system rujukan yang cepat dan efektif untuk balita yang membutuhkan perawatan intensif;
- 5) Melakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan tentang penanganan balita sakit, gizi, dan pelayanan emergensi;

- 6) Memberikan edukasi kepada orang tua tentang tanda-tanda bahaya pada balita dan kapan harus mencari bantuan medis;
- 7) Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti diare, pneumonia, dan malaria serta memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan pengobatan cepat untuk penyakit-penyakit tersebut;
- 8) Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan.

d. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita menunjukkan persentase banyaknya balita (usia 0 – 59 bulan) yang mengalami stunting (pendek dan sangat pendek) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan balita pada tahun yang sama dengan pengukuran indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U).

Pada Tahun 2024 jumlah stunting pada balita sebanyak 489 orang sedangkan jumlah sasaran balita sebanyak 10.077 orang, sehingga prevalensi stunting pada balita di Kota Gunungsitoli Tahun 2024 adalah sebesar 4,82 %.

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator kinerja prevalensi stunting pada balita tidak tercapai dengan menunjukkan capaian kinerja melewati ambang batas maksimal target yang telah ditetapkan yakni 5,43%.

Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, capaian indikator kinerja stunting pada balita sebesar 6,81%, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini menggambarkan adanya peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. Sehingga, diharapkan Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli dapat terus meningkatkan pelaksanaan program kegiatan yang terfokus dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita di Kota Gunungsitoli pada tahun – tahun mendatang.

Berikut gambaran trend pencapaian indikator kinerja prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, sebagai berikut :

Grafik 3.5.
Pencapaian indikator kinerja prevalensi stunting pada balita



Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (usia 0 - 59 bulan) merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek).

Pada Tahun 2024, jumlah stunting pada balita di Kota Gunungsitoli sebanyak 486 orang. Faktor utama masalah stunting disebabkan oleh sebagai berikut:

- Kurangnya konsumsi makanan bergizi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun);
- Infeksi berulang seperti diare, cacingan, atau infeksi saluran pernapasan dapat menghambat penyerapan nutrisi;
- Ibu hamil dengan gizi buruk atau anemia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan janin;
- Kurangnya akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak meningkatkan risiko penyakit infeksi;
- Faktor sosial dan ekonomi;
- Pola asuh yang kurang mendukung seperti pentingnya gizi dan perawatan kesehatan anak.

Identifikasi masalah prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kota Gunungsitoli Tahun 2024 dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Identifikasi Masalah Stunting pada Balita

No	Prioritas Masalah	Permasalahan	Pemecahan masalah/ tindak lanjut
1	Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	<p>1. Faktor Gizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya asupan gizi selama kehamilan dan masa bayi/balita. - Pola makan yang tidak seimbang. - Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola makan sehat. <p>2. Faktor Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infeksi berulang seperti diare, cacangan atau penyakit menular lainnya. - Kurangnya akses ke layanan kesehatan dan sanitasi yang memadai. <p>3. Faktor Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air bersih dan sanitasi yang buruk - Kurangnya kebersihan lingkungan <p>4. Faktor Sosial-Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemiskinan yang membatasi akses ke makanan bergizi dan layanan kesehatan; - Tingkat pendidikan orang tua yang rendah. <p>5. Faktor Pola Asuh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya gizi dan stimulasi dini; - Praktik pemberian makan yang tidak tepat. 	<p>1. Intervensi Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan asupan gizi yang cukup selama kehamilan dan masa bayi/balita - Medorong pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI (Makanan Pendamping ASI) yang bergizi. <p>2. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kehamilan secara rutin - Imunisasi dan pencegahan infeksi <p>3. Perbaikan Sanitasi dan Higiene</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai - Promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) <p>4. Edukasi dan Sosialisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola asuh yang baik - Pelatihan bagi orang tua, terutama ibu tentang perawatan anak <p>5. Dukungan Kebijakan Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program-program nasional seperti Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPGS) - Alokasi anggaran untuk pencegahan stunting.

e. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor resiko terjadinya

penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5.

Nilai IKS dapat diketahui berjenjang mulai dari tingkat keluarga, tingkat wilayah yang paling kecil (RT) hingga tingkat nasional. Selain untuk menunjukkan gambaran keluarga sehat, nilai IKS ini juga bisa menunjukkan nilai tiap-tiap indikator yang terdapat dalam 12 indikator tersebut. Intervensi dapat didasarkan pada nilai IKS per indikator, dapat juga berdasarkan IKS wilayah. Intervensi berdasarkan nilai IKS per indikator didasarkan dan disesuaikan dengan standar pada masing-masing program sesuai dengan indikator tersebut, misalnya nilai IKS untuk indikator Penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan sesuai standar maka, intervensinya disesuaikan dengan pedoman penanggulangan penyakit tidak menular dan sesuai dengan panduan praktik klinik di masing-masing tingkat fasyankes. Intervensi yang berdasarkan nilai IKS wilayah dapat berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, disesuaikan dengan nilai IKS masing-masing indikator pada wilayah-wilayah tersebut. Yang selanjutnya intervensi tiap indikator juga disesuaikan dengan pedoman masing-masing program.

Kementerian Kesehatan telah merumuskan 12 indikator yang dipakai untuk menentukan suatu keluarga itu tergolong sehat atau tidak. Ke 12 indikator tersebut adalah:

- 1) Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi;
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta);
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak;

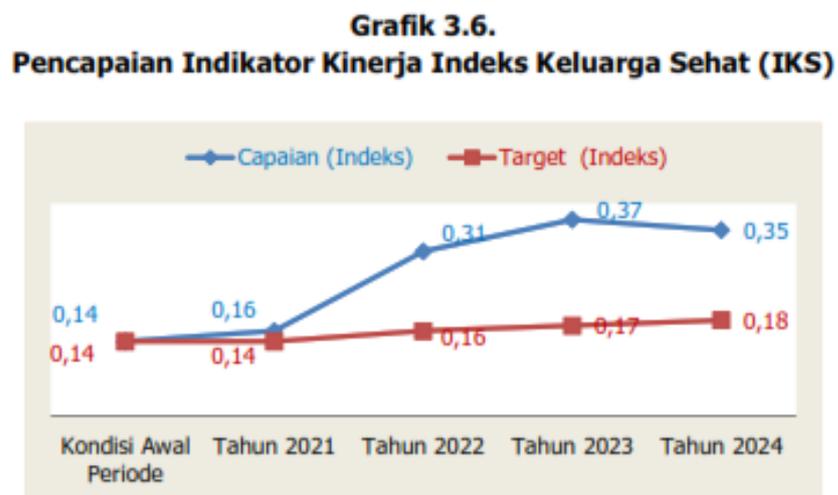
- 4) Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif);
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas Kesehatan;
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas Kesehatan;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadangkadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya;
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari;
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Tentu saja keluarga itu beragam, ada yang hanya terdiri dari 2 orang lansia, misalnya kakek dan nenek, tetapi bisa juga keluarga besar suami, istri, 10 orang anak yang umurnya dari bayi sampai remaja. Oleh karena itu keluarga dinyatakan sehat bila indikator yang layak diterapkan pada keluarga tersebut >80% tergolong baik.

Dalam satu wilayah tertentu, misalnya satu desa, andaikan ada 1000 keluarga, setelah dilihat 12 indikator keluarga sehat tersebut, dapat diketahui berapa persen keluarga yang tergolong sehat. Bila ada 450 keluarga yang tergolong sehat, maka proporsi keluarga sehat di desa tersebut adalah $450 / 1000 * 100\% = 45\%$. Proporsi ini bila ditulis dalam bentuk indeks menjadi 0,45. Jadi IKS desa tersebut adalah 0,45.

Dengan demikian IKS merupakan proporsi keluarga sehat / jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarnya berkisar antara 0 – 1.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Gunungsitoli yang dilaksanakan di wilayah kerja 8 (delapan) UPTD Puskesmas lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :



Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 0,35. Bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) yakni 0,18 maka, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini telah tercapai dari target yang ditetapkan.

Bila dibandingkan pencapaian indikator kinerja Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Tahun 2023 yakni sebesar 0,37, maka pencapaian indikator kinerja ini menggambarkan penurunan capaian indikator kinerja, sehingga diharapkan pencapaian ini dapat ditingkatkan pada tahun – tahun berikutnya.

Adapun distribusi hasil penilaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Distribusi hasil penilaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2024

No	Unsur	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
1	IKS UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli	0,33
2	IKS UPTD Puskesmas Kauko Kecamatan Gunungsitoli	0,35
3	IKS UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	0,34
4	IKS UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	0,35
5	IKS UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan	0,58
6	IKS UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara	0,33
7	IKS UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat	0,32
8	IKS UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	0,12
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Gunungsitoli		0,35

Dalam penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024, tidak terlepas dari berbagai permasalahan, adapun identifikasi masalah penilaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Identifikasi masalah penilaian Indeks Keluarga Sehat (IKS)				
No	Prioritas Masalah	Permasalahan	Penyebab masalah	Pemecahan masalah/ tindak lanjut
1	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Update Layanan Sasaran Keluarga Belum Maksimal	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan anggaran untuk petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan pembinaan keluarga Keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan pada pelaksanaan pemantauan keluarga 	<p>Penambahan jumlah tenaga kesehatan di desa untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan pembinaan keluarga</p>
		Update pada Aplikasi PIS PK	Gangguan Aplikasi PIS PK	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan admin pengelola aplikasi PIS PK baik di tingkat provinsi maupun pusat untuk melakukan maintenance pada aplikasi PIS PK Mengoptimalkan pelaksanaan update data manual PIS PK dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala disetiap unsur

f. Persentase Faskes (Puskesmas, RS) Terakreditasi

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal perlu dikelola dengan baik, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun sumber daya yang digunakan. Masyarakat menghendaki pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, serta dapat menjawab kebutuhan mereka, oleh karena itu upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien perlu diterapkan dalam pengelolaan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 57 ayat (1) juga mewajibkan Puskesmas untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2).

Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Puskesmas di Kota Gunungsitoli telah terakreditasi seluruhnya yakni 100% atau sebanyak 8 (delapan) Puskesmas yang telah terakreditasi dengan status akreditasi paripurna.

Berikut pencapaian indikator kinerja Persentase Faskes Terakreditasi di Kota Gunungsitoli :

Puskesmas Terakreditasi di Kota Gunungsitoli

No	Nama Puskesmas	Status Akreditasi	Masa Berlaku	Ket
1	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli	PARIPURNA	21 Okt 2023 s.d 21 Okt 2028	Puskesmas Rawat Inap
2	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat	PARIPURNA	25 Okt 2023 s.d 25 Okt 2028	Puskesmas Rawat Inap
3	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara	PARIPURNA	25 Nov 2023 s.d 25 Nov 2028	Puskesmas Rawat Inap
4	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan	PARIPURNA	22 Nov 2023 s.d 22 Nov 2028	Puskesmas Rawat Inap
5	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	PARIPURNA	29 Nov 2023 s.d 29 Nov 2028	Puskesmas Rawat Inap
6	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	PARIPURNA	02 Des 2023 s.d 02 Des 2028	Puskesmas Rawat Inap
7	UPTD Puskesmas Kauko Kecamatan Gunungsitoli	PARIPURNA	11 Nov 2023 s.d 11 Nov 2028	Puskesmas Rawat Inap
8	UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	PARIPURNA	16 Nov 2023 s.d 16 Nov 2028	Puskesmas Rawat Inap

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Pada tahun 2024 di Kota Gunungsitoli, jumlah faskes (puskesmas) terakrediasi sebanyak 8 (delapan) Puskesmas, sehingga dengan demikian capaian indikator kinerja Persentase Faskes Terakreditasi di Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 adalah 100%.

Melalui akreditasi puskesmas, diharapkan manajemen Puskesmas dapat menerapkan prosedur standar dengan baik sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kualitas yang diberikan oleh Puskesmas, akan menimbulkan persepsi pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Seluruh Puskesmas di Kota Gunungsitoli yang telah terakreditasi dengan status paripurna, diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan serta diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Gunungsitoli.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Pembangunan Gender	89,51%	89,92%	100,45%

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Kualitas hidup perempuan di Kota Gunungsitoli meningkat. Perempuan di Kota Gunungsitoli sudah memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang kuat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Gunungsitoli sudah baik yaitu 89,92 meningkat dari tahun sebelumnya 0,23 poin.

Namun partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan di swasta masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Belum adanya regulasi pemerintah yang mengatur kesetaraan gender di lembaga pemerintah;

- b. Perekrutan PNS pada jabatan struktural yang masih belum ramah perempuan;
- c. Diskriminasi, stigmatisasi perempuan di lembaga swasta;
- d. Pembatasan jenjang karir kepada kaum perempuan;
- e. Minimnya pemberdayaan perempuan dalam kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan di Kota Gunungitoli adalah melalui pemberdayaan perempuan. Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memberi ruang keterwakilan perempuan dalam semua bidang di lembaga pemerintah;
- b. Memperkuat payung hukum tentang pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah;
- c. Lembaga pemerintah memberi perhatian terhadap program pemberdayaan seperti kesetaraan gender dalam perekrutan PNS menempati jabatan struktural di Pemerintah;
- d. Promosi peran dan kontribusi perempuan untuk mendapatkan perhatian khusus di lembaga swasta;
- e. Pemberdayaan ekonomi perempuan sehingga tidak terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kemiskinan.

Adapun program yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Program Perlindungan Perempuan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Unggulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
1. PDRB Per Kapita	Rp. 51.050	Rp 50.410	98,74%
2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,17%	14,45%	95,25%
3. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Perdagangan	3,19%	4,70%	147,3%
4. Nilai Investasi	19 Miliar	47.798.669.296 Miliar	247%
5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,09%	3,30%	93,63%

1. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Salah satu strategi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Pembangunan pada sektor-sektor tersebut mendorong tersedianya kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan meemratakan distribusi pendapatan antar anggota masyarakat. Sehingga akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, pembangunan lebih ditekankan pada peningkatan yang bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sehingga akan mendongkrak daya beli untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Target PDRB Per Kapita tahun 2024 sebesar Rp. 51.050 sedangkan untuk realisasi sebesar Rp 50.410 dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan capaian kinerja sudah mencapai target. Persentase capaian kinerja pembangunan dengan indikator PDRB Per Kapita terhadap target dalam RPJMD 2021-2026 tercapai sebesar 98,74%.

Distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, yaitu:

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,73	14,60	14,97	14,89	14,94
2	Pertambangan dan Penggalian	2,80	2,82	2,77	2,77	2,73
3	Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
6	Konstruksi	21,91	21,82	20,29	20,17	20,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,46	25,49	26,54	27,15	27,41
8	Transportasi dan Pergudangan	8,71	8,74	8,48	8,39	8,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,90	3,95	4,16	3,99	4,00
10	Informasi dan Komunikasi	1,60	1,63	1,65	1,72	1,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	3,27	3,29	3,40	3,36
12	Real Estat	5,31	5,31	5,43	5,40	5,28
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,42	5,51	5,47	5,24	4,90
15	Jasa Pendidikan	5,07	5,06	5,07	5,03	4,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,78	0,81	0,78	0,79
17	Jasa Lainnya	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli

Dari 17 Kategori lapangan usaha yang ada di PDRB, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar pada tahun 2024 yaitu Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 27,41%, diikuti oleh Kontruksi sebesar 20,13% dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,94%.

2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Salah satu peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutan, dan perikanan, yaitu mencapai 14,45%.

Kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan penangkapan ikan di laut. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Data produksi kategori ini diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli, dan Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli. Selain itu data produksi diperoleh dari hasil survei-survei yang dilakukan BPS seperti Survei Pertanian, Survei PPI, Survei RPH, dan lain-lain. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Di samping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (standing crops) di awal periode yang disebut sebagai Work-in-Progress (WIP). Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP ditambah dengan nilai pelengkapnya. Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu sub kategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara. Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

Dalam rangka meningkatkan Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah berupaya melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pengembangan pangan lestari melalui pemanfaatan pekarangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan.
- b. Pelaksanaan pengawasan pasar di 6 Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka menjaga ketersediaan dan harga pasar.
- c. Penumbuhan kelompok penangkar benih padi di 2 Kecamatan yang turut mempengaruhi produktivitas padi.
- d. Penyediaan Fasilitas sarana produksi pertanian pada kelompok tani baik bibit/benih tanaman, pupuk maupun pestisida.
- e. Fasilitas Alat dan mesin pertanian pada kelompok tani di Kota Gunungsitoli.
- f. Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 4 Unit.
- g. Pembangunan rumah pompa sebanyak 5 unit.
- h. Penyediaan bibit ternak babi sebanyak 69 ekor pada unit pembibitan ternak babi.

Dalam mencapai indikator Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli mengalami beberapa kendala diantaranya:

- a. Dari sisi pengembangan Kampung Pangan Lestari, masyarakat Kota Gunungsitoli terkendala dalam pengaturan waktu untuk pertemuan kelompok maupun bimtek. Selain itu sebagian besar anggota kelompok tani telah berusia lanjut, sehingga menyulitkan dalam upaya pengembangan kapasitas kelompok tani yang lebih maju dan melek teknologi informasi.
- b. Pertanian perkotaan merupakan budidaya pertanian pada lahan sempit dan terbatas, sehingga dalam penerapannya membutuhkan banyak sekali komponen seperti tempat menanam khusus (plant pouch, polibag, planter bag), media tanam, pupuk dan lain-lain yang membutuhkan dana lebih besar sehingga setelah memperoleh Bimtek masyarakat kesulitan untuk penerapannya.
- c. Kemandirian kelompok tani di Kota Gunungsitoli masih belum terbentuk.

Untuk mengatasi permasalahan dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli melakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kordinasi antar OPD terutama Dinas Kesehatan, PKK dan Dinas Sosial terutama dalam penentuan lokasi kegiatan dalam rangka penanggulangan stunting dan peningkatan kesadaran konsumsi pangan B2SA, dalam rangka pengembangan kawasan Pangan Lestari.
- b. Terus menerus secara kontinyu melakukan koordinasi dengan wilayah, melibatkan semakin banyak stakeholder seperti akademisi dan praktisi pertanian, meningkatkan peran penyuluh sebagai pendamping pertanian di wilayah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui bimbingan teknis dan sekolah lapang.
- c. Meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh penyuluh dengan melaksanakan bimbingan pemeliharaan, perawatan, mengendalikan hama penyakit, serta memotivasi kelompok untuk dapat mengembangkan kelompoknya dan berani bersaing dengan petani yang lain dengan menyelenggarakan evaluasi kelompok tani, penilaian kelas kelompok.
- d. Mengalokasikan sumber daya anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas obat-obatan, bahan kimia maupun bahan dan alat kerja lainnya dalam rangka peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pertanian yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli.

Sementara Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli dalam mendukung Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan melaksanakan:

- a. Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah total hasil ikan tangkapan nelayan di Kota Gunungsitoli yang dihitung dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Data terkait produksi perikanan tangkap per Kecamatan disajikan pada Tabel berikut :

No	Kecamatan	Satuan	Produksi Perikanan Laut	
			2023	2024
1	Gunungsitoli	Ton	3.414	3.227
2	Gunungsitoli Idanoi	Ton	606	628
3	Gunungsitoli Selatan	Ton	272	284
4	Gunungsitoli Barat	Ton	-	-
5	Gunungsitoli Utara	Ton	2.776	3.011
6	Gunungsitoli Alo'oa	Ton	-	-
	Total	Ton	7.068	7.150

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa produksi perikanan tangkap sebagian besar dihasilkan di Kecamatan Gunungsitoli dan terendah di

Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Hasil produksi perikanan tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah jumlah armada penangkapan ikan dan jumlah nelayan/pelaku usaha. Hal ini dapat dikaitkan dengan data armada penangkapan ikan pada masing-masing kecamatan tahun 2024 dimana Kecamatan Gunungsitoli merupakan kecamatan yang memiliki armada penangkapan ikan terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan lain dengan jumlah kapal sebanyak 853 unit dan jumlah nelayan sebanyak 906 orang.

No	Kecamatan	Satuan	Perahu Tanpa Motor		Perahu Motor Tempel (0,5 GT)		Kapal Bermotor (3-7 GT)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gunungsitoli	Unit	155	195	559	581	76	77
2.	Gunungsitoli Idanoi	Unit	38	38	369	393	7	7
3.	Gunungsitoli Selatan	Unit	11	11	104	105	6	6
4.	Gunungsitoli Barat	Unit	-	-	-	-	-	-
5.	Gunungsitoli Utara	Unit	12	12	403	406	42	42
6.	Gunungsitoli Alo'oa	Unit	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		Unit	244	256	1.435	1.485	131	132

Bila dibandingkan dengan tahun 2023, capaian produksi perikanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2023 capaian produksi perikanan tangkap hanya mencapai 7.068 Ton. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan tahun – tahun sebelumnya antara lain penempatan rumpon di 4 (empat) kecamatan yang memiliki garis pantai yaitu Kec. Gunungsitoli utara, Gunungsitoli, Gunungsitoli selatan, dan Gunungsitoli idanoi. Penempatan rumpon merupakan satu cara untuk mengarahkan ikan pada suatu tempat yang dapat berfungsi sebagai rumah ikan sehingga mempermudah nelayan dalam melakukan usaha penangkapan dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh. Pada Tahun 2022 melalui program pengelolaan perikanan tangkap, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap yaitu :

1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Untuk tahun 2024 kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) fokus pada penyediaan operasional Pabrik Es Balok yang terletak di PPI Teluk Belukar. Pengelolaan Pabrik Es Balok bertujuan untuk menyediakan es balok bagi nelayan dan pelaku pemasar

hasil perikanan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Hal ini bertujuan untuk membantu nelayan dan penjual ikan untuk menyediakan bahan baku dengan harga murah sehingga biaya operasional dapat ditekan sekecil mungkin.

2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan nelayan kecil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik sehingga dapat mencapai produktifitas yang tinggi. Pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui pendampingan kelompok oleh penyuluh perikanan yang disediakan oleh dinas perikanan sehingga dengan keberadaan penyuluh, kelompok nelayan dapat meningkatkan kapasitas anggotanya melalui transfer teknologi, penyebaran informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan, dan proses rekayasa sosial.

3) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai.

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya kegiatan yang dilakukan yaitu pendataan produksi, pelaku usaha, serta sarana dan prasarana melalui sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya adalah total produksi ikan hasil budidaya yang diproduksi/dihasilkan dari usaha budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya di Kota Gunungsitoli tahun 2024 yang dihitung mulai dari bulan januari s.d desember 2024. Data produksi ikan budidaya tahun 2024 menurut masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Kecamatan	Satuan	Produksi	
			2023	2024
1	Gunungsitoli	Ton	27,70	19,52
2	Gunungsitoli Idanoi	Ton	16,74	12,34
3	Gunungsitoli Selatan	Ton	1,34	3,36
4	Gunungsitoli Barat	Ton	23,14	17,18
5	Gunungsitoli Utara	Ton	12,73	10,24
6	Gunungsitoli Alo'oa	Ton	13,59	10,88
	Total	Ton	95,24	73,52

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2024 total produksi perikanan budidaya mencapai 73,52 ton yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai 95,24 ton sedangkan tahun 2024 hanya 73,52 ton.

Penurunan produksi perikanan budidaya tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Adanya peningkatan harga pakan yang sangat signifikan akibat dari perekonomian global yang tidak menentu mengakibatkan meningkatnya biaya operasional (biaya produksi) semakin meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh dari usaha budidaya ikan sangat tipis bahkan menimbulkan kerugian bagi pembudidaya. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah komoditi yang dibudidayakan serta luas kolam yang dikelola yang berdampak pada produksi.
- b. Meningkatnya produksi perikanan tangkap juga berpengaruh pada harga jual yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga jual ikan hasil budidaya sehingga harga jual ikan budidaya kalah saing dengan ikan laut hasil penangkapan.

Meskipun demikian, Dinas Perikanan tetap melakukan upaya peningkatan produksi melalui beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Penyediaan Bibit unggul yang diproduksi di BBIAT;
- 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pembudidaya melalui penyuluhan;
- 3) Adanya sinergitas antara APBD Kota Gunungsitoli dengan APBDes pada beberapa desa dimana pada tahun 2024 beberapa pemerintahan desa melakukan pelatihan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang salah satunya adalah budidaya ikan lele.

No	Kecamatan	Jumlah Pembudidaya		Jumlah Kelompok Pembudidaya	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Gunungsitoli	211	211	10	10
2	Gunungsitoli Idanoi	73	73	5	5
3	Gunungsitoli Selatan	45	45	3	3
4	Gunungsitoli Barat	76	76	6	6
5	Gunungsitoli Utara	144	144	11	11
6	Gunungsitoli Alo'oa	82	82	6	6
	Jumlah Total	631	631	41	41

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah pembudidaya ikan sama dengan jumlah pembudidaya tahun 2023.

3. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Pertumbuhan ekonomi sektor perekonomian di Kota Gunungsitoli dapat dilihat dari berapa besar kontribusinya terhadap PDRBnya. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB.

Pada tahun 2024, ditargetkan Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan Kota Gunungsitoli sebesar 3,19% dengan realisasi sebesar 4,70%. Dalam mencapai target dimaksud, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli melaksanakan beberapa program antara lain:

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting; dan
2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Beberapa permasalahan yang mempengaruhi Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan, antara lain:

- a. Masifnya perdagangan online, perdagangan online memiliki dua sisi yang kontradiksi. Memudahkan dan mematikan. Perdagangan online sangat memudahkan para usahawan untuk mengembangkan pemasaran, promosi usaha, selain itu juga memberi kemudahan kepada konsumen untuk memiliki banyak pilihan.
- b. Melakukan pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok serta peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

Bagi produsen skala besar yang memiliki sumber daya capital dan dapat menekan biaya produksi produk, telah memiliki jaringan kuat di bisnis tertentu, harga produk yang ditawarkan untuk barang sejenis lazimnya dapat lebih ditekan

biayanya dibanding dengan pengusaha produk sejenis dalam skala kecil dan menengah.

Pilihan-pilihan tersebut membuat banyak produk yang memiliki keunggulan, baik dari kualitas dan harganya didominasi oleh produsen besar, imbasnya pedagang-pedagang didaerah seperti di Kota Gunungsitoli secara umum belum dapat bersaing dan perputaran uang dari daerah keluar ke daerah-daerah lain sangat besar. Hal ini berdampak kurang baik untuk gerak perekonomian lokal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menaikkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan kedepannya, selain mencari solusi dari dua hal tersebut di atas, adalah dengan cara penguatan ekonomi kerakyatan. Memperkuat basis-basis usaha ekonomi tempatan dari berbagai sektor dan diakomodir oleh pemerintah daerah. Baik dorongan program kegiatan untuk peningkatan pengetahuan atau wawasan produknya, membantu proses pemasaran agar lebih luas dan tepat sasaran serta antisipasi inflasi pada momen dan produk tertentu, karena walaupun sifatnya musiman tetapi apabila durasi dan ritmenya cukup sering dan panjang akan mempengaruhi ekonomi makro daerah.

4. Nilai investasi

Jumlah Nilai Investasi di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp 47.798.669.296 Miliar** dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 19 Miliar yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Perusahaan	Skala usaha	Investasi Tahun 2024
1	CV BRIAN PUTRA ANUGERAH PRATAMA	Besar	630.000.000
2	CV. IVAN	Besar	420.000.000
3	PT. PLN NUSANTARA POWER	Besar	1.823.795.943
4	CV. NISTENG PERKASA	Besar	630.000.000
5	INDOMARCO PRISMATAMA	Besar	3.984.553.261
6	METTA MEDICA	Besar	8.936.235.636
7	RSU DAERAH dr. M. THOMSEN NIAS	Besar	393.497.600
8	NIAGA INDOGUNA YASA	Besar	1.108.236
9	MIDI UTAMA INDONESIA	Besar	207.419.866
10	MEDAN DISTRIBUSINDORAYA	Besar	2.308.533.167
11	ASRIAMAN ZEGA	Besar	4.020.000.000
12	CV KURNIA ALMAHESA (PMDN)	Besar	420.000.000
13	PT PERTAMINA PATRA NIAGA (PMDN)	Besar	713.647.735
14	PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BA- TAM (PMDN)	Besar	677.994.149
15	PT NIAGA INDOGUNA YASA (PMDN)	Besar	5.295.627
16	CV SARO ANUGRAH MULIA (PMDN)	Besar	16.000.000
17	PT NIAGATAMA KENCANA (PMDN)	Besar	2.250.000

No	Nama Perusahaan	Skala usaha	Investasi Tahun 2024
SUBTOTAL USAHA SKALA BESAR:			Rp 25.190.331.220
1	HALIM TAPA	Menengah	3.960.000.000
2	MITRA SAMAERI	Menengah	2.050.000.000
3	PUTRA JAYA MANDIRI	Menengah	3.190.000.000
4	YORDAN	Menengah	345.410.000
5	BETHESDA SANOLO	Menengah	334.121.063
6	JOEN KARYA MANDIRI	Menengah	30.000.000
7	YOHANES GREGORIUS GUMA TUKAN	Menengah	5.800.000.000
8	MIRADEAL JAYA	Menengah	76.460.000
SUBTOTAL USAHA SKALA MENENGAH:			Rp 15.785.991.063
1	PT. KADESE LESTARI	Kecil	30.197.000
2	CV BINTANG KERAMIK	Kecil	1.000.000.000
3	CV CITIMART	Kecil	50.000.000
4	CV KENCANA DISTRIBUSI	Kecil	252.000.013
5	CV ELTANIA YANK ELEGANT	Kecil	125.000.000
6	CV GOWWE BANGUN NUSANTARA	Kecil	40.000.000
7	CV SIHASARA PASTI MAJU	Kecil	120.000.000
8	CV SONDORO	Kecil	200.000.000
9	Perorangan BERNAD TANRYONO	Kecil	150.000.000
10	Perorangan ELISABET INDAH WATY	Kecil	210.000.000
11	Perorangan HENDRIS	Kecil	2.106.600.000
12	Perorangan HERMAN ARIANTO ZILIWU	Kecil	500.000.000
13	Perorangan MARIANI LASE	Kecil	5.000.000
14	Perorangan ROBERT JANELY	Kecil	50.000.000
15	PT CAHAYA BARU SHIPYARD	Kecil	108.550.000
16	PT LASOZIHONO	Kecil	350.000.000
17	PT LIQUID KENCANA ABADI	Kecil	1.400.000.000
18	TOKO BOLA MAS	Kecil	125.000.000
SUBTOTAL USAHA SKALA KECIL:			Rp 6.822.347.013
TOTAL INVESTASI TAHUN 2024			Rp 47.798.669.296
JUMLAH REALISASI INVESTASI TAHUN 2023 (n-1)			Rp 94.087.335.185
JUMLAH REALISASI INVESTASI TAHUN 2022 (n-2)			Rp 54.709.170.193
JUMLAH REALISASI INVESTASI TAHUN 2021 (n-3)			Rp 38.161.985.480
PENINGKATAN INVESTASI (n-1)			-Rp 46.288.665.889
CAPAIAN PENINGKATAN INVESTASI (n-1)			-0,9684

Dari target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli, untuk indikator Nilai Investasi ditargetkan pencapaiannya adalah 19 Miliar dengan realisasi sebesar **Rp 47.798.669.296 Miliar** sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja “Nilai Investasi” tahun 2024 **sudah mencapai target**.

Dalam mendukung pencapaian indikator Nilai Investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024 didukung oleh dua dimensi yaitu dimensi penganggaran dan juga dimensi non penganggaran sebagai berikut :

1. Dimensi Penganggaran

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk dalam dimensi penganggaran DPMPTSP Kota Gunungsitoli yang mendukung pencapaian target kinerja adalah **Program** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan **Kegiatan** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari **2 sub Kegiatan** yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembinaan berupa sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan usahanya sehingga dapat mengawasi terkait kepatuhan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan sub kegiatan dimaksud secara langsung meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melaporkan modal usahanya pada aplikasi OSS RBA sehingga meningkatkan jumlah Investor dan nilai realisasi investasi di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Selanjutnya **Program** Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan **Kegiatan** Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan **sub kegiatan** Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sangat mendukung tercapainya indikator kinerja Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal dengan realisasi sebanyak 2.109 dokumen perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

2. Dimensi Non Penganggaran

Tercapainya indikator kinerja DPMPTSP Kota Gunungsitoli tidak hanya didukung oleh program kegiatan berdasarkan dimensi penganggaran. Upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Gunungsitoli dalam meningkatkan mutu pelayanan dan melakukan inovasi yang tidak terikat anggaran juga memberikan dampak yang positif terhadap pencapaian indikator kinerja, sehingga dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

- a. Inovasi yang dilakukan DPMPTSP Tahun 2024 adalah dengan mengembangkan Layanan Tanya Izin melalui aplikasi WhatsApp yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli untuk mengakses layanan perizinan berusaha dan non berusaha tanpa harus ke kantor DPMPTSP Kota Gunungsitoli dan cukup hanya meninggalkan pesan pada nomor layanan Tanya Izin maka akan diarahkan oleh petugas untuk membantu pemrosesan layanan yang diinginkan.
- b. Melakukan Inovasi langsung terhadap pemrosesan layanan perizinan dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah sehingga masyarakat Kota Gunungsitoli tidak merasa enggan untuk mengurus dokumen perizinan yang diperlukan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya aparatur;
- b. Belum optimalnya kerjasama sumber daya aparatur lintas Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli menetapkan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala pada tahun mendatang antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;
- b. Meningkatkan kerjasama sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung terlaksananya program/kegiatan serta melaksanakan koordinasi dengan beberapa Perangkat Daerah teknis terkait.

5. Tingkat pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikasi penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran/pencari kerja terhadap jumlah Angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: $TPT = (\text{Pencari Kerja} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100\%$.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya dan mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai kerja.

Tahun 2024 Pemerintah Kota Gunungsitoli menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,09% dan realisasi sebesar 3,30%, hal ini menunjukkan capaian kinerja (93,63%) belum mencapai target karena realisasi lebih besar dari pada target persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan indikator negatif dimana semakin rendah realisasi indikatornya semakin baik.

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Dan selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun serta lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan melaksanakan program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Hubungan Industrial dan berupaya melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan peralatan Balai Latihan Kerja (BLK);
- b. Penyusunan kalender latihan kerja tahunan;
- c. Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi;
- d. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online;
- e. Optimalisasi kelembagaan untuk perlindungan kerja

- f. Pengembangan Pasar Rakyat serta pembangunan pasar penyangga di Desa Saewe dan Desa Miga;
- g. Perencanaan pembangunan pasar;
- h. Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok; dan
- i. Pemantuan Harga dan Stok Kebutuhan Barang Pokok.

Disamping Langkah-langkah tersebut melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Gunungsitoli dalam melakukan terobosan/ inovasi dalam mengurangi angka pengangguran, yaitu:

- a. Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah di 6 Kecamatan;
- b. Pengembangan Koperasi, UKM dan IKM berbasis potensi lokal;
- c. Pengembangan pelaku usaha industri melalui plafon perdagangan digital;
- d. Mendorong produk UMKM mendapatkan PIRT, sertifikat halal dari MUI dan terdaftar di BPOM;
- e. Bantuan Modal kepada UMKM (BLUD); dan
- f. Pengembangan dan penataan sarana Pelayanan BLUD.

Sasaran 5 : Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Penduduk Miskin	12,81%	17,72%	72,29%

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Capaian kinerja terhadap target persentase penduduk miskin yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 12,81% tercapai sebesar 72,29%. Realisasi persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 sebesar 17,72%. Persentase penduduk miskin di Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 sebesar 17,72% mengalami kenaikan sebesar 2,94% dibandingkan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 14,79%. Pada tahun 2024, garis kemiskinan Kota Gunungsitoli secara total sebesar Rp 493.644 perkapita perbulan.

Kapabilitas seseorang dalam ekonomi seringkali terbentur dengan kemiskinan. Uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan. Faktor kemiskinan dapat menghambat berbagai aspek dalam kehidupan diantaranya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia. Menanggulangi kemiskinan bukan perkara yang mudah karena terkait dengan berbagai dimensi kehidupan yang saling berpengaruh satu sama lain.

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Gunungsitoli 2016-2024

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	304.727	32,17	23,43
2017	318.585	30,08	21,66
2018	327.303	25,91	18,44
2019	339.671	23,06	16,23
2020	370.697	23,54	16,41
2021	408.190	24,02	16,45
2022	426.349	21,85	14,81
2023	459.787	22,03	14,78
2024	493.644	22,16	17,72

Indeks Kedalaman Kemiskinan merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai garis kemiskinan. Penurunan indeks artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Beberapa permasalahan dalam menurunkan angka kemiskinan antara lain:

- a. Belum adanya indikator kelayakan untuk kemiskinan;
- b. Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan yang kolaboratif; dan

- c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan sehingga berdampak pada alur perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan antara lain:

- a. Penyusunan indikator kemiskinan;
- b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan membuat Peta Proses Bisnis yang didukung oleh Tim Ahli dan Perangkat Daerah pengampu program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. Penyusunan peta masalah dan implementasi monitoring dan evaluasi dengan menggunakan kertas kerja.

Sasaran 6 : Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase PMKS Yang Tertangani	36,92%	83%	112,40%

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Berdasarkan basis data terpadu tahun 2024 jumlah PMKS sebanyak 86.397 orang dan jumlah keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 11.131 KPM. Tahun 2024 Pemerintah Kota Gunungsitoli menargetkan Persentase PMKS yang Tertangani sebesar 36,92% dengan realisasi sebesar 83% dari target yang ditentukan sehingga capaian kinerja atas indikator ini sebesar 112,40%. Capaian ini diperoleh dari perhitungan Jumlah PMKS yang Tertangani dibagi jumlah PMKS dibagi Jumlah PMKS yang Ada dikali 100.

**Jumlah PMKS yang terdata di dalam DTKS Di Wilayah Kota Gunungsitoli
Menurut Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kecamatan Gunungsitoli	Orang	5.890	41.854	41.715	37.300	34.123
2	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	Orang	4.006	22.609	22.453	20.127	18.364
3	Kecamatan Gunungsitoli Selatan	Orang	2.315	11.513	11.394	9.946	9.004
4	Kecamatan Gunungsitoli Barat	Orang	1.204	6.997	6.972	6.082	5.538
5	Kecamatan Gunungsitoli Utara	Orang	2.648	16.275	16.136	14.767	13.474
6	Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	Orang	1.031	7.135	7.026	6.409	5.893
7	Anomali (Data tidak Terdeteksi)	Orang	-	20	1	8	-
Jumlah Total			17.094	106.403	106.403	94.639	86.397

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Jumlah PMKS Yang Mendapat Penanganan Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Satuan	Jumlah				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kecamatan Gunungsitoli	Orang	3.876	5.953	3.843	31.320	27.339
2	Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	Orang	1.856	4.778	2.805	18.318	16.122
3	Kecamatan Gunungsitoli Selatan	Orang	1.495	2.056	1.456	8.822	7.618
4	Kecamatan Gunungsitoli Barat	Orang	908	1.220	930	5.378	4.649
5	Kecamatan Gunungsitoli Utara	Orang	3.160	2.596	1.783	13.296	11.546
6	Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	Orang	798	1.121	812	5.909	5.315
7	PMKS Lainnya	Orang	-	-	1.026	-	-
Jumlah Total			12.094	17.724	12.665	83.043	72.589

Sumber : Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial tertinggi ada pada Kecamatan Gunungsitoli. Sedangkan jumlah masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang rendah terdapat di Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Capaian kinerja indikator ini memang sudah mencapai target, namun masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan masalah kesejahteraan sosial disebabkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang selalu dinamis (terutama fakir miskin) dan melalui proses verifikasi dan validasi terlebih dahulu.

Persentase PMKS Yang Tertangani adalah salah satu indikator dari sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 yaitu Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Sosial melaksanakan beberapa program Tahun 2024, yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Perlindungan Sosial; dan
- d. Program Penanganan Bencana.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam meningkatkan Persentase PMKS Yang Tertangani skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan jumlah petugas dalam penyaluran bantuan, dan sebagian besar anggaran bantuan sosial ini dianggarkan pada PAPBD, ditambah dengan akses jalan masih ada yang sulit dijangkau dengan kendaraan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Anggaran dalam penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di kelompok masyarakat yang termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- c. Memenuhi Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- d. Memenuhi Tenaga Ahli pada Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ);
- e. Meningkatkan Pengetahuan dan Pelatihan bagi Pekerja Sosial, Pendamping PKH, Konselor dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. Melaksanakan Verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkala, untuk memastikan data yang akurat.

Sasaran 7 : Meningkatkan Kemandirian Desa

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Desa Membangun	0,6202	0,6470	104%

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa.

Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya.

Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Instrumen tersebut dikenal dengan istilah Indeks Desa Membangun (IDM).

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kota Gunungsitoli mulai menunjukkan peningkatan. Desa yang memenuhi kriteria strata tertinggal menurun. Pada tahun 2023 desa dengan strata tertinggal sebanyak 15 Desa dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 26 Desa. Dengan demikian, indeks desa membangun pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,0199 poin dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator IDM sendiri pada tahun 2024 sebesar 104% meningkat 1,99% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan desa di Kota Gunungsitoli dipengaruhi oleh ketahanan sosial yang mulai membaik, kondisi ketahanan ekonomi yang mantap, dan ketahanan lingkungan yang sangat baik pula.

Pencapaian target Indeks Desa Membangun (IDM) Kota Gunungsitoli Tahun 2024 mencakup 3 (tiga) indeks komposit yaitu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan yang diurai dalam beberapa dimensi, diantaranya :

1. Indeks Komposit Sosial, terdiri dari Dimensi Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Pemukiman.
2. Indeks Komposit Ekonomi, terdiri dari Dimensi Keragaman Produksi, Perdagangan, Akses Distribusi, Akses Kredit, Lembaga Ekonomi dan Keterbukaan Wilayah.
3. Indeks Komposit Lingkungan, terdiri dari Dimensi Kualitas Lingkungan dan Potensi Tanggap Bencana.

Tercapainya target indikator tidak lepas dari peranan dari berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya target antara lain :

1. Pendataan dan pengisian kuisisioner oleh petugas semakin baik;
2. Pembangunan desa melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi semakin fokus pada peningkatan kemandirian desa;
3. Peran perangkat daerah (Kesehatan, Ekonomi dan Lingkungan) yang terkait terus berusaha memenuhi kebutuhan untuk menaikkan nilai Indeks Desa Membangun; dan
4. Pelaksanaan koordinasi dan validasi data yang rutin dilaksanakan.

Dalam mencapai target indikator, tentu saja tidak sempurna. Masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara keseluruhan dan bahkan mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antar lain:

1. Adanya evaluasi data pengisian kuisisioner sehingga mengakibatkan adanya perubahan data atau pengurangan data;
2. Kemampuan personil dalam mengisi data kuisisioner di masing-masing desa tidak merata;
3. Terbatasnya kemampuan perangkat daerah yang menangani dimensi Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan dalam memenuhi Tenaga/Fasilitas Kesehatan dan Tenaga/Fasilitas Pendidikan di masing-masing desa;
4. Terbatasnya kapasitas dan kuantitas aparatur dalam memvalidasi dan mengolah data Indeks Desa Membangun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berupaya untuk:

- a. Melakukan evaluasi dan validasi data yang akurat;

- b. Pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas personil yang mengisi data Indeks Desa Membangun di masing-masing desa;
- c. Melaksanakan koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam menentukan prioritas kebutuhan desa untuk meningkatkan nilai indeks;
- d. Pelatihan bagi aparatur (tingkt Kota dan Kecamatan) dalam memvalidasi dan mengolah data Indeks Desa Membangun;
- e. Melakukan pendampingan pada perencanaan pembangunan desa untuk diarahkan pada peningkatan nilai Indeks Desa Membangun.

Sasaran 8 : Meningkatnya Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
1. Persentase Jalan Kondisi Baik	33,06%	58,78%	177%
2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	65%	50,76%	78,09%
3. Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	99,01%	98,89%	99,87%

1. Persentase Jalan Kondisi Baik

Luas seluruh jalan yg ada di Pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2024 adalah sepanjang 545.544,67 M, dari luas seluruh jalan tersebut kondisi jalan baik Kota Gunungsitoli adalah sepanjang 293.387,60 M.

Salah satu indikator dalam mencapai sasaran Meningkatnya Infrastruktur dan Prasarana Wilayah adalah Persentase Jalan Kondisi Baik dengan rumus perhitungan adalah total jalan dalam kondisi bisa dilalui lebih dari 40 km/jam dibagi panjang jalan keseluruhan di Kota Gunungsitoli dikali 100. Dari rumus perhitungan tersebut diperoleh realisasi sebesar 58,78%.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Jalan Kondisi Baik} &= (\text{Total Jalan Dalam Kondisi Bisa Dilalui Lebih Dari 40 Km per Jam} \\
 &\quad / \text{Panjang Jalan Keseluruhan di Kota Gunungsitoli}) \times 100 \\
 &= (252.224,44 / 545.544,67) \times 100 \\
 &= \mathbf{58,78\%}
 \end{aligned}$$

Kondisi ini menyatakan bahwa capaian persentase jalan kondisi baik sudah tercapai dari target yang telah ditetapkan. Hal ini sangatlah penting mengingat jalan merupakan faktor penting dalam pembangunan infrastruktur di Wilayah Kota Gunungsitoli. Jalan yang baik merupakan kondisi jalan dalam keadaan baik. Hal ini

dapat dicapai dengan pemeliharaan rutin dan berkala jalan. Program penyelenggaraan jalan merupakan program dan kegiatan guna mencapai indikator kinerja.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan Persentase Jalan Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya akses jalan yang belum sepenuhnya baik;
- b. Belum terpenuhinya tenaga terampil konstruksi bersertifikat; dan
- c. Belum optimalnya sinergi kebijakan pemerintah.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Jalan Kondisi Baik adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketercukupan jumlah jalan, meningkatkan kenyamanan jalan, peningkatan kondisi dan kualitas jalan, dan fasilitasi penunjang jalan (trotoar marka, drainase jalan, dll);
- b. Memprioritaskan peningkatan/ rehabilitasi/ pemeliharaan berkala/ rutin jalan dan jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga terampil konstruksi, dan
- d. Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan pemerintah.

2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024, Presiden Jokowi telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Di Kota Gunungsitoli, pembangunan infrastruktur diorientasikan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran aktivitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah. Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah agar seluruh wilayah Kota Gunungsitoli dapat terakses secara baik sehingga sumber-sumber ekonomi dan modal sosial lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Untuk melakukan pengukuran persentase ketersediaan fasilitas sarana

perhubungan diukur dengan rumus perhitungan jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dibagi jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan dikali 100.

FOTO DOKUMENTASI PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN ALAN UMUM



Dari target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli, untuk indikator ini ditargetkan pencapaiannya adalah 65% dengan realisasi sebesar 50,76% sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja “Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan” tahun 2024 **belum mencapai target**.

3. Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu:

- a. Kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan

jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

- b. Kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di Kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis.
- c. Dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut juga mengakibatkan kondisi Kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Pemerintah Kota Gunungsitoli terus melakukan Tindakan pengentasan Kawasan non Kumuh Perkotaan dengan melakukan peningkatan kualitas permukiman dengan cara perbaikan infrastruktur melalui program pengembangan perumahan (rumah layak huni), pemantapan akses jalan, peningkatan akses sanitasi, dan penanganan sampah dan limbah.

Luas Kawasan Kumuh perkotaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RP3KP seluas 17,10 Ha yang terdiri dari 4 Kawasan permukiman kumuh, pada tahun 2024 tidak ada penanganan kawasan kumuh di Kota Gunungsitoli karena pada P.APBD 2024 adanya rasionalisasi alokasi anggaran pada belanja kegiatan yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli seperti kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian dalam hal ini untuk pembangunan jalan lingkungan tidak dapat dilaksanakan sehingga persentase kawasan non kumuh perkotaan pada tahun 2024 hanya mencapai 98,89% dan tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 sehingga kondisi kawasan kumuh sampai dengan tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu 28,65% dari luas kawasan kumuh, jadi sisa luasan kawasan kumuh perkotaan sampai tahun 2024 seluas 12,20 Ha terdiri dari 3 kawasan. Dengan demikian target indikator kinerja penanganan kawasan kumuh tahun 2024 sebesar 36,26% dan capai sebesar 28,65% sehingga persentase capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar 79,01%. Dan apabila kita bandingkan dengan target Indikator Kinerja pada akhir Renstra sebesar 53,22% dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 28,65% maka persentase pencapaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 53,83%. Jadi luasan penanganan kawasan kumuh

dan persentase kawasan non kumuh sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Luas Penanganan Kawasan Kumuh Tahun 2024

No	Nama Kawasan Kumuh	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	%
1	2	3	4	5
1	Kawasan Pasar	4,42	0,30	6,79
2	Kawasan Remeling	4,40	4,40	100
3	Kawasan Ilir	5,97	0,20	3,35
4	Kawasan Mudik	2,31	0,00	0
JUMLAH		17,10	4,90	28,65

Persentase Kawasan Non Kumuh Tahun 2024

No	Nama Kawasan Kumuh	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	Luas Kawasan Kumuh 2022
1	2	3	4	5
1	Kawasan Pasar	4,42	0,30	4,12
2	Kawasan Remeling	4,40	4,40	0
3	Kawasan Ilir	5,97	0,20	5,77
4	Kawasan Mudik	2,31	0,00	2,31
JUMLAH		17,10	4,90	12,20

Dari data tersebut di atas dapat dihitung dengan rumus :

Persentase kawasan non kumuh perkotaan = $\frac{\text{Luas Kawasan Non Kumuh Perkotaan}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$

Luas Kawasan Permukiman = 1.096,78 Ha

Luas Kawasan Kumuh Perkotaan = 12,20 Ha

Luas Kawasan Non Kumuh Perkotaan = 1.084,58 Ha

Persentase Kawasan Non Kumuh = 98,89%

Kendala Penanganan Kawasan Kumuh :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan penanganan Kawasan Kumuh;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat bagi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh;
3. Keterbatasan anggaran untuk penanganan Prasaranan, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman kumuh.

Dalam mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus berupaya untuk pencapaian target persentase penanganan Kawasan Kumuh yaitu:

1. Segera menyelesaikan dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh;
2. Melakukan sosialisasi pada masyarakat yang ada dikawasan permukiman kumuh mengenai hidup sehat agar terhindar dari stunting;
3. Diupayakan tersedia anggaran untuk penanganan PSU di kawasan permukiman Kumuh.

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,83%	65,37%	119,22%

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan parameter indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks tutupan hutan (ITH) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah.

Perolehan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau disingkat IKLH merupakan gabungan hasil pengukuran perolehan nilai Indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. Nilai Indeks kualitas Air adalah sebesar 30% dari perolehan nilai IKA hasil pengukuran selama setahun. Demikian halnya dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 30% dari perolehan nilai IKU, sedangkan untuk ITH sebesar 40% dari nilai perolehan. Sehingga IKLH diperoleh dari akumulasi IKA, IKU dan ITH dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = 30\% \text{IKA} + 30\% \text{IKU} + 40\% \text{ITH}$$

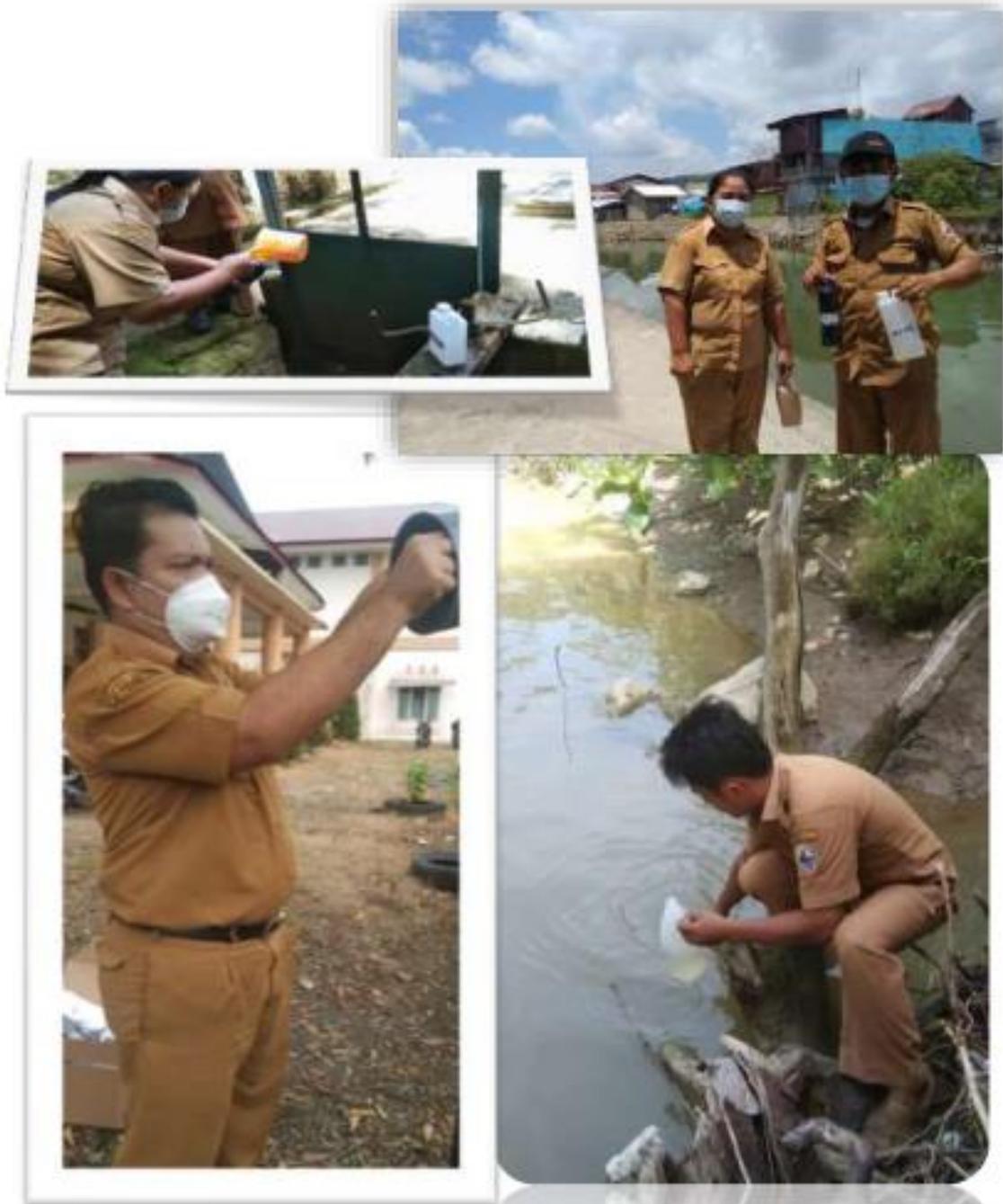
No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024	
			Target	Capaian
	- Meningkatnya kualitas Air	Indeks Kualitas Air	54,01	49,83
	- Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	93,94	95,96
	- Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks tutupan hutan	35,03	35,66

Nilai IKA diperoleh dari pengukuran selama 2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tiap semester. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli setiap tahun anggaran melalui program kegiatan **Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** karena IKLH

ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah tetapi sudah menjadi intervensi pemerintah provinsi maupun nasional. Untuk nilai IKLH sendiri setiap target di daerah telah ditetapkan besarnya setiap tahun oleh pemerintah pusat. Hal ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana di daerah, sejak tahun 2021 hingga 2024 pelaksanaan program kegiatan untuk perolehan nilai IKU dan ITH dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sehingga pemerintah daerah (Kota Gunungsitoli) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli hanya melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perolehan nilai IKA. Untuk nilai IKA, IKU dan ITH wajib diinput perolehan nilainya melalui aplikasi IKLH setiap semester pada tahun berjalan. Dinas Lingkungan Hidup sendiri hanya mengisi nilai IKA melalui aplikasi, sedangkan nilai IKU dan ITH diinput oleh pelaksana kegiatan itu sendiri. Dinas Lingkungan Hidup hanya menggunakan data (nilai indeks) yang telah diisi melalui aplikasi.

Nilai IKLH yang telah diperoleh sebagaimana telah dijelaskan diatas menggambarkan bagaimana kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicapai selama tahun 2024. Dari hasil disimpulkan bawah capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup **sudah mencapai target** yaitu dengan Persentase pencapaian **119,22%**. Dari hasil persentase dimaksud berdasarkan kategori penilaian kinerja, pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah sudah sangat berhasil. Hal ini secara umum menggambarkan kondisi lingkungan di wilayah Kota Gunungsitoli masih dalam kondisi baik. Meskipun demikian, hal ini menjadi tanggungjawab bersama untuk tetap mempertahankan kondisi kualitas lingkungan di wilayah Kota Gunungsitoli terlebih dimasa mendatang yang menjadi warisan bagi anak cucu kita.

Dokumentasi pengambilan sampel Air dan Udara oleh Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2024



Namun meskipun sudah mencapai target, Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Gunungsitoli harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi kedepannya.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan IKLH adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya indeks respon daerah dalam menyusun kebijakan dan peraturan terkait lingkungan hidup;
2. Struktur dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

3. Sedikitnya alokasi anggaran yang mempengaruhi implementasi terhadap pelaksanaan program kegiatan serta penyediaan sarana prasarana lingkungan;
4. Minimnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan; dan
5. Kurangnya inovasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Sosial budaya dan tingkat kesadaran masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, di wilayah Kota Gunungsitoli sosial budaya dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar semakin krisis. Masyarakat cenderung memikirkan diri sendiri bahkan tingkat respon terhadap pengelolaan lingkungan semakin sedikit. Masyarakat lebih cenderung memikirkan hal yang serba instan dan menghasilkan profit dalam waktu cepat serta semua ingin dilayani. Salah satu contoh adalah dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya permintaan pelayanan pengangkutan sampah-sampah di rumah-rumah warga bahkan tanpa dilakukan proses pemilihan sementara sampah-sampah rumah tangga dan atau sampah sejenis rumah tangga tersebut masih bisa diolah secara mandiri sehingga menghasilkan manfaat dan dapat dipergunakan kembali (*Metode 3R*). Minimnya kepedulian dari seluruh stakeholder maupun masyarakat terhadap lingkungan hidup untuk tetap menjaga, merawat kelestariannya akan mempengaruhi tercapainya kinerja yang diharapkan dan terwujudnya lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan IKLH adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui upaya pengoptimalan proses operasional yang ada dan efisiensi anggaran serta mengidentifikasi permasalahan utama untuk mengambil kebijakan dan menetapkan target prioritas utama untuk dilakukan agar mendukung tercapainya kinerja.
2. Kemitraan dan kolaborasi. Hal ini terbukti selama kurun waktu tahun 2017 hingga sekarang Dinas Lingkungan Hidup menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah provinsi dhi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pengujian sampel/ analisa laboratorium untuk kualitas air yaitu dengan mengirimkan sampel air setiap semester ke laboratorium DLH Provinsi Sumatera Utara. Untuk pengukuran kualitas udara, peralatan dan perangkat kerja berasal dari Kementerian PUPR yang selanjutnya melalui Dinas Lingkungan Hidup membantu memasang setiap alat yang digunakan untuk setiap titik sampel yang telah ditentukan. Demikian juga untuk ITH masih dibantu oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Perangkat Satelit untuk mendapatkan Nilai Indeks Tutupan Hutan.

3. Program Pendidikan maupun kediklatan teknis bagi sumber daya aparatur dibidang lingkungan hidup. Pada Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah mengutus salah satu pejabat untuk mengikuti Diklat dasar-dasar AMDAL.
4. Keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan melalui sosialisasi, edukasi dan upaya-upaya preventif lainnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Tetap giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya terutama melalui media keluarga, media sekolah-sekolah, media lingkungan kerja dan media massa/publik/social, serta diharapkan kiranya adanya kelompok penggiat/pecinta lingkungan aktif dan massif serta melakukan inovasi-inovasi dibidang lingkungan hidup.

Sasaran 10 : Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Persentase Bencana Yang Tertangani	100%	100%	100%
2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	74,87%	74,40%	99,37%

1. Persentase Bencana Yang Tertangani

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Aspek pentingnya adalah bukan hanya penanganan kedaruratan, namun juga pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan.

Kota Gunungsitoli berada dalam rawan bencana dengan resiko bencana tinggi dan pernah mengalami bencana yang cukup parah. Berkaitan dengan hal tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang dalam penanganan terhadap kejadian bencana, dituangkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kota Gunungsitoli sudah mengantisipasi timbulnya bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana melalui pengembangan regulasi yang memadai, perencanaan dan penganggaran, pengembangan kapasitas

kelembagaan dan sumber daya manusia. Paradigma penanggulangan bencana sudah dikembangkan dari yang dulu berpola responsif-tanggap darurat menjadi lebih ditekankan pada upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

Sasaran meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana tercapai dengan sangat tinggi. Hal ini dilihat dari indikator persentase bencana yang tertangani yang tercapai 100% dari target 100% atau nilai capaian 100%.

Wilayah Kota Gunungsitoli termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana. Bencana yang hampir setiap tahun terjadi adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Dari seluruh kejadian bencana di Kota Gunungsitoli yang paling menonjol adalah tanah longsor dan kebakaran.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana yaitu Peningkatan Sistem Penanggulangan Bencana melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif bencana terhadap pembangunan.

Hambatan – hambatan yang dihadapi diantaranya:

- a. Pertumbuhan Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan.
- b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di Perangkat Daerah untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternative akan disusun sistem data terpadu terkait dengan kebencanaan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran (Kabupaten/ Kota) adalah:

- a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing pelaksana kegiatan untuk mensukseskan target kinerja yang telah direncanakan.
- b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
- c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak terlaksana.
- d. Optimalisasi penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik, dan media social terkait pelaksanaan kegiatan.

- e. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Pemerintah Pusat.

2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota

Sasaran “***Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana***” dicapai melalui indikator kinerja yaitu: cakupan pelayanan bencana Kabupaten/ Kota. Indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai sasaran strategis “***Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana***” adalah dengan menilai cakupan pelayanan bencana Kabupaten/ Kota. Penilaian capaian kinerja untuk mengetahui persentase cakupan pelayanan bencana Kabupaten/ Kota dihitung dengan menggunakan rumus/ formula sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1	Mewujudkan pelayanan bencana kebakaran di wilayah Kota Gunungsitoli	cakupan pelayanan bencana Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)}}{\text{Luas wilayah kota}} \times 100\%$

Sesuai dengan formula di atas, maka capaian indikator kinerja utama untuk “cakupan pelayanan bencana Kabupaten/ Kota” diperoleh berdasarkan *Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)* dibagi luas wilayah Kota dikali 100%. Pada tahun 2024 jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang telah ditangani seluas 346,42 km² (kondisi awal) dengan jumlah desa sebanyak 78 desa, akan tetapi pada tahun 2024 telah terjadi kebakaran sebanyak 17 (tujuh belas) kejadian kebakaran. Dari 17 (tujuh belas) kejadian kebakaran tersebut sebanyak 16 (enam belas) kejadian kebakaran terjadi didalam wilayah manajemen kebakaran (WBK) dan ada 1 (satu) kejadian kebakaran yang terjadi dan tertangani diluar wilayah manajemen kebakaran (WBK) yaitu di Desa Hiligodu Ulu Kecamatan Gunungsitoli Utara dengan luas desa 2,79 km, sehingga terjadi penambahan luas wilayah manajemen kebakaran (WBK) menjadi 349,21 km (kondisi akhir) dari luas wilayah Kota Gunungsitoli seluas 469,36 km. Dengan demikian terjadi penambahan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran tahun 2024 sebesar 0,59% (2,79 km) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 73,81% (346,42 km) menjadi 74,40% (349,21 km) dengan persentase capaian sebesar 99,37% dengan realisasi 99,37% sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten/ Kota	74,87%	74,40%	99,37%



Capaian kinerja untuk “cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota)” Tahun 2024 terealisasi sebesar 74,40 % dari target sebesar 74,87 % sehingga indikator capaian sebesar **99,37% (belum tercapai)**.

Hambatan – hambatan yang dihadapi pada cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Pertumbuhan Kota yang semakin masif mengakibatkan adanya lokasi pemukiman baru yang tidak terlindungi bahaya kebakaran;
- b. Akses informasi yang cepat dan transparan kepada masyarakat;
- c. Kebutuhan layanan penyelamatan non kebakaran yang semakin bertambah dari masyarakat;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana di kawasan perkotaan yang mendukung aksesibilitas layanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran (Kabupaten/ Kota) adalah:

- a. Merencanakan pembentukan pos pemadam kebakaran di beberapa titik lokasi strategis.
- b. Peningkatan akses jalan oleh dinas terkait sehingga memudahkan mobil pemadam kebakaran untuk menjangkau lokasi WMK.

Sasaran 11 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	60,00	78,26	130%
2. Nilai SAKIP	B	CC	90%
3. Indeks Profesionalitas ASN	58,00	74,78	129%

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan suatu pengukuran yang memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD dimaksud merupakan kali ke-3 (dua) dilakukan, dan hasilnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3 – 387 TAHUN 2024 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022 diperoleh bahwa Indeks Total Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli adalah 78,26 dengan Predikat “B” pada Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota seluruh Indonesia Kemampuan Keuangan Daerah “Sedang” dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Indikator Kesesuaian Nomenklatur program RPJMD dan RKPD, RKPD dan KUA-PPAS, KUA-PPAS dan APBD, serta Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dan KUA-PPAS dan APBD pada **dimensi Kesesuaian**

dokumen perencanaan dan penganggaran, dengan nilai indeks 10,982.

Pada dimensi 1 ini, untuk pengukuran pada Tahun 2024 atas IPKD Tahun 2023 ditargetkan skor/indeks sebesar 5, tercapai sebesar 10,982 yang sebelumnya pada Tahun 2023 atas Pengukuran IPKD 2022 sebesar 11.654 atau naik sebesar 0,67, capaian tersebut tidak berubah secara signifikan mengingat bahwa proses pembinaan dini terkait perencanaan anggaran melalui pembinaan teknis penganggaran dalam penyelenggaraan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah berjalan dimulai dari tahapan perencanaan sampai pada penganggaran. Namun demikian fungsi pembinaan ini akan terus ditingkatkan untuk menunjang pencapaian skor yang lebih baik kedepannya.

- b. Indikator Persentase Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Infrastruktur dan Pemenuhan SPM pada ***dimensi Kualitas anggaran belanja dalam APBD, dengan nilai indeks 19,655.***

Pada dimensi 2 ini, untuk pengukuran pada Tahun 2024 atas IPKD Tahun 2023 ditargetkan skor/indeks sebesar 15, tercapai sebesar 19,655 yang sebelumnya pada Tahun 2023 atas Pengukuran IPKD 2022 sebesar 19.31 atau naik sebesar 0,35, capaian ini dilakukan dengan melakukan penajaman pada capaian program bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta pemenuhan SPM melalui pengalokasian anggaran secara cermat serta memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan terkait pengalokasian *mandatory spending* pada fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pemenuhan SPM sesuai dengan perencanaan kinerja.

- c. Indikator Ketepatan Waktu dan Keteraksesan pada ***dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah, dengan nilai indeks 11.897.***

Pada dimensi 3 ini, untuk pengukuran pada Tahun 2024 atas IPKD Tahun 2023 ditargetkan skor/indeks sebesar 5, tercapai sebesar **14,483** yang sebelumnya pada Tahun 2023 atas Pengukuran IPKD 2022 sebesar **11.897** atau naik sebesar **2,59**, Capaian kinerja pada indikator dimaksud akan terus dilakukan dengan peningkatan penyediaan Informasi Keuangan Daerah utamanya dalam hal ketepatan waktu dan pemenuhan jadwal pelaksanaan dan penetapan pada Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD sehingga dapat di upload pada website resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli tepat waktu dan dapat terakses oleh publik,

- d. Indikator Realisasi Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada **dimensi Penyerapan anggaran, dengan nilai indeks 15.**

Pada dimensi 4 ini, untuk pengukuran pada Tahun 2024 atas IPKD Tahun 2022 ditargetkan skor/indeks sebesar 5, tercapai sebesar **15** yang sebelumnya pada Tahun 2023 atas Pengukuran IPKD 2022 sebesar **15**, hal ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan fungsi verifikasi dan validasi atas Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam menjaga stabilitas arus kas (*cash flow*) pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

- e. Indikator Kemampuan Keuangan Daerah pada **dimensi Kondisi keuangan daerah, dengan nilai indeks 3,140.**

Pada dimensi 5 ini, untuk pengukuran pada Tahun 2024 atas IPKD Tahun 2022 ditargetkan skor/indeks sebesar 5, tercapai sebesar **3,140** yang sebelumnya pada Tahun 2023 atas Pengukuran IPKD 2022 sebesar **3,718** atau turun sebesar 0,578 . hal ini akan terus diperbaiki dan ditingkatkan dengan menjaga keseimbangan Keuangan dalam pemenuhan kewajiban dan pelayanan umum, yang pengukurannya dilakukan melalui pengukuran atas capaian LKPD tahun sebelumnya termasuk dalam pelaksanaan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan LKPD Tahun sebelumnya.

- f. Indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) **dengan nilai indeks 15.**

Pada dimensi 6 ini, untuk pengukuran pada Tahun 2024 atas IPKD Tahun 2022 ditargetkan skor/indeks sebesar 5, tercapai sebesar **15** yang sebelumnya pada Tahun 2023 atas Pengukuran IPKD 2022 sebesar **15** atau berada pada skor maksimal.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai berikut:

- a. Masih belum adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran dimulai dari dokumen RPJMD, RKPD, KUAPPAS, dan APBD;
- b. Belum maksimalnya transparansi pengelolaan keuangan daerah di media *website* resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- c. Kemampuan Keuangan Daerah pada dimensi Kondisi Keuangan Daerah, yang tercermin pada capaian LKPD Pemerintah Daerah terkait Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, dan Solvalibilitas Keuangan yang

scoringnya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi acuan keuangan di tingkat provinsi dan daerah lain dalam klaster kemampuan keuangan yang sama.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan peran teknis dalam perencanaan dan penganggaran APBD, khususnya dalam menjaga alur, kesesuaian dan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, baik itu dokumen RPJMD, RKPD, KUAPPAS, dan APBD;
- b. Optimalisasi transparansi pengelolaan keuangan daerah di media *website* resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- c. Penyajian data-data dan informasi terkait dengan pengukuran IPKD kepada Tim Pengukuran IPKD di level Provinsi melalui kanal komunikasi yang tersedia termasuk dengan optimalisasi fungsi aplikasi berbasis elektronik dibidang perencanaan dan keuangan daerah.
- d. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, utamanya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Nilai SAKIP

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah Nilai SAKIP. Pemberian nilai evaluasi SAKIP kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi kepada Kepala Daerah atas capaian tersebut.

Nilai SAKIP Kota Gunungsitoli Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah CC. Capaian kinerja untuk “Nilai SAKIP” Tahun 2024 **Belum mencapai target**. Nilai SAKIP Kota Gunungsitoli masih perlu lebih ditingkatkan lagi karena masih menunjukkan nilai CC (nilai 50-65) yang mengindikasikan nilai “Cukup (memadai) dan perlu banyak perbaikan”.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP adalah:

- a. Perencanaan kinerja daerah masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis yang bersifat kegiatan/output, belum merumuskan kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome;
- b. Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup untuk dijadikan sebagai alat ukur dan kinerja daerah;
- c. Penetapan program dan kegiatan belum sepenuhnya berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga masih terdapat program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya relevan dengan tujuan/sasaran strategis yang merupakan prioritas pembangunan daerah;
- d. Sistem evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan bagi setiap organisasi Perangkat Daerah, dikarenakan evaluasi yang dilakukan belum mendorong perbaikan kualitas penerapan manajemen kinerja yang spesifik dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi Tim SAKIP khususnya Bappelitbang, Inspektorat Daerah, dan Bagian Organisasi Setda dalam mengawal kualitas dan implementasi SAKIP Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- b. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah secara menyeluruh;
- c. Melakukan perbaikan atau menyempurnakan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan menyesuaikan pada Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Melakukan kerjasama pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli oleh Tenaga Ahli dan Peneliti yang berkompeten dan profesional, baik secara teknis maupun dalam pembuatan aplikasi SMARTSAKIP dan Aplikasi Penilaian Mandiri Internal SAKIP Kota Gunungsitoli.

3. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP) ASN merupakan salah satu Indikator Kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dituangkan dalam RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026, pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP) ASN digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN. Adapun kriteria yang digunakan dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP) ASN yaitu dimensi kualifikasi pendidikan ASN, dimensi kompetensi ASN (diklat, bimtek, seminar, workshop, magang dan kursus), dimensi kinerja (sasaran kegiatan pegawai dan perilaku kerja pegawai) dan dimensi disiplin ASN.

Kategori tingkat profesionalitas ASN

Nilai	Kualifikasi
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
< 60	Sangat Rendah

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN yang dicapai berada pada angka 74,78 sedangkan target yang direncanakan pada angka 58.00 pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat profesionalitas ASN Pemerintah Kota Gunungsitoli berada pada kualifikasi sangat rendah. Tentunya hal ini menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam upaya peningkatan Nilai profesionalitas ASN Kota Gunungsitoli. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN terutama berada pada dukungan anggaran dalam memfasilitasi ASN untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui tugas belajar dan memfasilitasi ASN dalam pengembangan kompetensi melalui diklat-diklat, bimtek, workshop, magang dan kursus. Disamping itu perlu adanya kontrol dan pengawasan dari pimpinan instansi dan atasan langsung ASN dalam peningkatan kinerja maupun disiplin ASN. Apabila hal ini dapat dipenuhi adanya peningkatan Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kota Gunungsitoli sangat besar.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dipergunakan pada tahun 2024 adalah capaian Nilai IP ASN per tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebesar 74,78%. Jika dibandingkan antara target 2024 dengan nilai capaian IP ASN 2024 maka terlihat bahwa rencana kinerja yang ditargetkan melebihi target yang ingin dicapai yaitu sebesar 58%. Walau realisasi kinerja melebihi target namun secara kategori profesionalitas ASN secara Nasional, Pemerintah Kota Gunungsitoli masih berada pada level yang sedang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja atas Nilai IP ASN baik secara teknis dijabarkan sebagai berikut:

- a. Proses penilaian IP ASN menggunakan data yang terintegrasi dari aplikasi SAPK ke aplikasi DJ ASN. Proses integrasi data ini masih berjalan secara manual sehingga memperlambat proses penginputan data IP ASN. Selain itu, data yang diinput dalam SAPK belum semuanya terupdate dengan kondisi riil data pegawai di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu perlu proses percepatan integrasi data secara otomatis dari aplikasi SAPK ke aplikasi DJ ASN.
- b. Ketidaksinkronan jadwal antara pelaporan SAKIP dengan waktu terbitnya nilai IP ASN, sangat mempengaruhi proses analisis keberhasilan/kegagalan kinerja khususnya IP ASN Pemko Gunungsitoli yang merupakan IKU dari Wali Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu sebaiknya tenggat waktu pengukuran IP ASN oleh BKN Pusat dipercepat sehingga tidak terkendala dalam penyampaian data untuk pelaporan-pelaporan kinerja di daerah.
- c. Kelalaian masing-masing ASN di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan update data pegawai dalam aplikasi My SAPK. Data kepegawaian yang sangat penting untuk selalu di update yang dapat mendukung peningkatan nilai IP ASN yaitu berupa SK Pencantuman Gelar, sertifikasi-sertifikasi diklat teknis maupun fungsional, bimtek (20 JP), sosialisasi/coaching/ monitoring/kursus/studi banding/workshop yang diikuti selama 5 tahun terakhir. Apabila data ini terupdate dalam My SAPK sangat membantu dalam pengumpulan data untuk pengukuran nilai IP ASN di Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama masing-masing pengelola kepegawaian di setiap unit kerja untuk mengingatkan setiap ASN di unit kerja mengupdate data kepegawaian dalam My SAPK.

Secara non teknis, terkait dengan 4 dimensi utama dalam penilaian IP ASN, yaitu:

1. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran. Ada beberapa kendala yang selama ini mempengaruhi dalam pengukuran IP ASN di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu:
 - a. Beberapa ASN lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli yang telah menerima bantuan tugas belajar untuk meningkatkan jenjang pendidikan namun gagal dalam proses penyelesaian pendidikan yang diikuti. Tentunya ini merugikan daerah dan menghambat pengukuran nilai dimensi kualifikasi pendidikan dalam IP ASN.
 - b. Banyak ASN di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli yang telah memperoleh peningkatan pendidikan secara mandiri namun tidak dapat mengikuti penyesuaian ijazah dan tidak memperoleh SK Pencantuman Gelar karena tidak memiliki Izin Belajar. Izin Belajar tidak dapat diperoleh oleh ASN dari Pemerintah Kota Gunungsitoli karena adanya Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 28 Tahun 2021 yang mencabut pemberian Izin Belajar bagi ASN. Hal ini juga sangat menghambat pengukuran nilai dimensi kualifikasi pendidikan dalam IP ASN. Oleh karena itu, sebaiknya perlu adanya peninjauan ataupun kebijakan terbaik terkait izin Belajar bagi ASN.
 - c. Keterbatasan pengalokasian anggaran untuk memfasilitasi ASN mengikuti Tugas Belajar dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kota Gunungsitoli. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk pengalokasian anggaran tugas belajar, sehingga bertambah jumlah ASN yang mengalami peningkatan pendidikan.
2. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar/ Workshop/

Magang/ Kursus. Beberapa kendala yang mempengaruhi bobot dimensi kompetensi, yaitu:

- a. Belum tersedianya Angka Kebutuhan Diklat (AKD) di Pemerintah Kota Gunungsitoli berpengaruh terhadap prioritas pelaksanaan diklat tahun berjalan di Pemerintah Kota Gunungsitoli.
 - b. Disamping itu alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan diklat prioritas dimaksud. Semakin besar alokasi anggaran yang tersedia untuk memfasilitasi ASN dalam pengembangan kompetensi maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap peningkatan pengukuran IP ASN Pemerintah Kota Gunungsitoli yang memiliki bobot 40% dari seluruh dimensi pengukuran IP ASN.
3. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi kinerja diperhitungkan sebesar 30% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Saasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Ada beberapa hal yang mempengaruhi bobot dimensi Kinerja di Pemerintah Kota Gunungsitoli, yaitu: Laporan SKP dan PKP seluruh ASN di Pemerintah Kota Gunungsitoli belum semua disampaikan di BKPSDM Kota Gunungsitoli sehingga data yang diinput dalam aplikasi DJ ASN bukanlah merupakan data riil keseluruhan SKP dan PKP ASN lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli. Perlu adanya kerjasama dan perhatian dari Pimpinan Unit Kerja dalam mengingatkan seluruh pegawai di unit kerja dalam penyampaian dan penyelesaian SKP dan PKP ASN di unit kerja di BKPSDM Kota Gunungsitoli.
4. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Dalam proses pengukuran IP ASN di lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli dimensi disiplin tidak memiliki kendala dalam pengukurannya karena tetap dilaporkan sesuai dengan jumlah penjatuhan hukuman disiplin yang telah ditetapkan.

Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	80%	100%	125%

Maksud dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai pengguna layanan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik merupakan indikator dalam mencapai sasaran strategis **“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”**. Sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja dengan merujuk pada Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli dilakukan dengan menyebarkan lembar Kuesioner kepada Pengguna Layanan dimasing-masing Unit Kerja. Pada Tahun 2024 ada 23 (dua puluh tiga) unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Sekretariat DPRD	80,95	B (Baik)
2	Dinas Sosial	89,91	A (Sangat Baik)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,00	B (Baik)
4	Dinas Perikanan	91,27	A (Sangat Baik)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	91,52	A (Sangat Baik)
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	88,00	A (Sangat Baik)
7	Dinas Pendidikan	86,47	A (Sangat Baik)
8	Dinas Kesehatan	85,95	A (Sangat Baik)
9	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	78,03	B (Baik)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	90,60	A (Sangat Baik)
11	Kantor Kecamatan Gunungsitoli	87,07	A (Sangat Baik)
12	Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara	79,32	B (Baik)
13	Kantor Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	83,77	A (Sangat Baik)
14	Kelurahan Ilir	78,11	B (Baik)

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
15	UPTD Pengelola Dana Bergulir	83,63	A (Sangat Baik)
16	UPTD Puskesmas Gunungsitoli	90,46	A (Sangat Baik)
17	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Selatan	88,44	A (Sangat Baik)
18	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat	87,61	A (Sangat Baik)
19	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Utara	87,72	A (Sangat Baik)
20	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Idanoi	88,69	A (Sangat Baik)
21	UPTD Puskesmas Kauko	85,58	A (Sangat Baik)
22	UPTD Puskesmas Idanoi Tolamaera	78,80	B (Baik)
23	UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa	88,68	A (Sangat Baik)
NILAI IKM KOTA GUNUNGSITOLI		82,26	

Realisasi Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik diperoleh berdasarkan Nilai IKM Perangkat Daerah yang bernilai baik dibagi jumlah Perangkat Daerah yang melakukan survei dikali 100%. Dari 23 (dua puluh tiga) unit kerja yang telah melaksanakan survei, semuanya mendapat predikat baik. Berdasarkan dari perhitungan tersebut, maka realisasi dari persentase indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah yang bernilai baik adalah 100%.

Capaian kinerja untuk “Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik” Tahun 2024 **sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan**. Namun meskipun sudah mencapai target, Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik perlu terus ditingkatkan lagi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai IKM Baik adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerjanya;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan survei.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Yang Bernilai Baik adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen pimpinan;
2. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengisi survei kepuasan masyarakat dengan sungguh-sungguh (obyektif) dalam memberikan pendapatnya.

Sasaran 13 : Meningkatnya Digitalisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,46	2,23	90,65%

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yaitu Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menetapkan beberapa sasaran RPJMD Tahun 2021-2026, salah satu sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya Digitalisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dengan indikatornya adalah Skor Penilaian Mandiri Indeks SPBE. Tahun 2024 Kota Gunungsitoli menetapkan target indikator kinerja skor penilaian mandiri Indeks SPBE 2,46 (Nilai Indeks SPBE) sedangkan realisasi hanya mencapai nilai 2,23 dengan predikat SPBE “CUKUP”

Capaian kinerja indikator ini sebesar 90,65% hampir mencapai target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala untuk tercapainya target pada tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Terbatasnya anggaran tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan interkoneksi dengan Perangkat Daerah yang belum terhubung pada jaringan intra pemerintah daerah Kota Gunungsitoli.
- b. Terbatasnya kompetensi petugas (administrator) dalam tertib administrasi dan kemampuan teknis.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka meningkatkan indeks SPBE sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan disetiap domain dan aspek yang dinilai seperti kebijakan internal definitive, adanya Tim Pengarah SPBE, Rencana induk SPBE, Kebijakan integrasi data dan integrasi aplikasi pemerintah.
- b. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan SPBE di masing-masing OPD serta melaksanakan pengintegrasian antar aplikasi, antar pemerintah dan instansi lainnya adanya kebijakan yang definitif dapat meningkatkan nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Sasaran 14 : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	68,93%	85%	123%

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan alat ukur untuk mengetahui keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Indeks Ketentraman dan Ketertiban diperoleh dari Tingkat Keamanan + Persentase Penyelesaian Pelanggaran PERDA + Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS dibagi 3.

Lingkungan sosial masyarakat di Kota Gunungsitoli relatif tentram, tertib, dan nyaman. Masyarakat melakukan berbagai aktivitas dengan tentram, tertib, dan teratur. Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2024 sudah baik yaitu sebesar 85% dari target sebesar 68,93%. Capaian kinerja indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban sendiri pada tahun 2022 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 123%.

Lingkungan sosial masyarakat di Kota Gunungsitoli yang relatif tentram, tertib, dan nyaman didukung oleh persentase penyelesaian pelanggaran PERDA, tingkat keamanan, dan persentase jumlah polisi pamong praja PNS.

$$\begin{aligned}\text{Indeks Ketentraman dan Ketertiban} &= (\text{Tingkat Keamanan} + \text{Persentase Penyelesaian Pelanggaran} \\ &\quad \text{PERDA} + \text{Persentase Jumlah Polisi Pamong Praja PNS}) / 3 \\ &= (100 + 100 + 55) / 3 \\ &= \mathbf{85\%}\end{aligned}$$

Faktor yang mempengaruhi meningkatkan indeks ketentraman dan ketertiban di Kota Gunungsitoli antara lain:

- a. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang tegas dan merupakan dasar hukum penertiban yang dilakukan dilapangan.
- b. Adanya Perda dan Perwal yang tertuju untuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Adanya dukungan dari instansi terkait sebagai stakeholder Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI untuk menegakkan Perda.
- d. Anggota Satpol PP yang memiliki loyalitas dan totalitas dalam melaksanakan tugas dalam Penegakan Perda.
- e. Adanya PPNS yang perannya sangat dibutuhkan dalam proses penegakan peraturan daerah di Wilayah Kota Gunungsitoli.
- f. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hakekat hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan ketertiban dan ketentraman dan kenyamanan kota dalam menyelesaikan konflik serta mitigasi bencana.
- h. Meningkatnya peran tugas pengamanan pengendali keamanan di lingkungan.
- i. Peningkatan pelaksanaan patroli di berbagai tempat di setiap kecamatan, kota, desa dan kelurahan.
- j. Penambahan jumlah personil Linmas di berbagai kecamatan, desa dan keurahan.
- k. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
- l. Terjalinnnya hubungan kerjasama yang baik antar instansi atau stakeholder terkait untuk kepentingan menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sasaran 15 : Terciptanya Masyarakat Yang Berkarakter Berbasis Nilai Budaya Lokal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Indeks Budaya Lokal	58,25%	67,87%	116,51%

Kebudayaan merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan definisi dari Kemdikbud (2013), kebudayaan sendiri merupakan gagasan, perilaku, serta hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Proses interaksi berbagai macam budaya yang berjalan dalam waktu lama, terikat, dan terstruktur satu sama lain akan membentuk sistem kebudayaan (Kemdikbud, 2013). Kebudayaan memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya pembangunan. Dalam hal ini, kebudayaan berfungsi sebagai penguat identitas jati diri bangsa yang berorientasi pada masa depan. Kebudayaan merupakan dasar untuk menentukan arah kebijakan dan arah pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian daerah terhadap kebudayaan lokal yang ada diwilayahnya menjadi hal yang penting dikaji.

Secara eksplisit, hal ini tertera dalam UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 yang membahas tentang peranan kebudayaan yang digunakan di segala lini kehidupan. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan UU Pemajuan Kebudayaan No. 5 tersebut, penting bagi tiap-tiap daerah untuk mengelola objek-objek budaya di wilayahnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pula, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing terkait pengelolaan objek-objek kebudayaan. Capaian daerah dalam mengelola dan melestarikan kebudayaan tersebut sudah selayaknya mendapat apresiasi.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menargetkan indikator kinerja indeks budaya lokal sebesar 58,25% dengan realisasi sebesar 67,87% atau capaian kinerja sebesar 116,51%. Capaian ini diukur dari rumus perhitungan: persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 tahun ditambah persentase jumlah sanggar seni dan budaya ditambah persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi 3.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 tahun	75%	100%	104,24%
2	Persentase Jumlah Sanggar seni dan budaya	74%	77,14%	107%
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.	25,76%	26,47%	102,75%

Capaian indeks budaya lokal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 tahun.

Persentase pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 tahun di Tahun 2024 yang didapatkan dari Jumlah kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan Osale, pertahun direncanakan 4 kali. Pelaksanaan kegiatan festival seni dan budaya dalam 1 tahun **sudah mencapai target**. Penyelenggaraan event pagelaran seni dan budaya yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tempat	Ket
1.	Nias Ethnic Music Competition (NEMC) 2024	Taman Ya'ahowu	Kreativitas dalam harmonisasi irama tradisi nias
2.	Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) Kota Gunungsitoli	Taman Ya'ahowu	Kostum Karnaval Hasil Karya Komunitas Kreatif
3.	OSALE (Open Stage Art Live Event)	Taman Ya'ahowu	Live Musik/ Band
4.	Wali Kota Cup	Lapangan Pelita, GOR Cendrawasih, Lapangan Futsal, Lapangan Laverna, dan Ruang Rapat 3, Aula Polres Nias	Sepak Bola, Bulutangkis, Voli, Tenis Meja, Futsal, Karate, Silat

1. Nias Ethnic Music Competition



2. Pekan Kebudayaan Daerah



3. Osale



4. Wali Kota Cup



b. Persentase jumlah sanggar seni dan budaya.

Persentase Jumlah Sanggar Seni dan Budaya dalam 1 tahun **sudah mencapai target** alasannya Pada Indikator Persentase Jumlah Sanggar Seni dan budaya Target Kinerja pada Tahun 2024 adalah 74% dengan capaian 77,14%, pencapaian ini karena jumlah sanggar yang sudah dibentuk dan terdaftar di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli Tahun 2024 berjumlah 54 sanggar sedangkan rencana jumlah sanggar seni dan budaya yang akan dibentuk Tahun 2024 berjumlah 70 sanggar.

c. Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan **sudah mencapai target** alasannya pada Indikator Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Target Kinerja pada Tahun 2024 adalah 25,76% sedangkan capaian 26,47% dimana jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang sudah didata berjumlah 238 buah sedangkan yang sudah dilestarikan berjumlah 63 buah.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka meningkatkan indeks budaya lokal adalah:

- a. Belum optimalnya upaya pelestarian dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah di Kota Gunungsitoli;
- b. Kurangnya pembinaan kelompok masyarakat golongan seni dan budaya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan indeks budaya lokal adalah:

- a. Peningkatan ekspansi serta identifikasi terhadap Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dilestarikan sebagai bagian dari sejarah dan potensi ekonomi berbasis wisata.
- b. Pemberdayaan berbasis komunitas seni dan budaya melalui penyelenggaraan event secara reguler.
- c. Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya.
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.

Keberhasilan kinerja daerah tercermin dari capaian 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) indikator Pemerintah Kota Gunungsitoli. Dari indikator tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,91	72,30	101,96%
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,03%	3,84%	63,68%
3	Indeks Gini	Indeks	0,30	0,27	90%
4	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	12,81%	14,72%	87,02%
5	Laju Inflasi	Persentase	3,24%	3,10%	95,67%
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	100%
7	Indeks Harmoni Sosial	Indeks	74,68	76,43	102,3%
8	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Persentase	61,95%		

1. Indeks Pembangunan Manusia

RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026 memuat visi “Kota Gunungsitoli Berdaya Saing, Nyaman, dan Sejahtera”. Untuk mewujudkannya, visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) misi. Misi pertama pembangunan daerah yaitu: Membangun sumber daya manusia yang unggul yang bertujuan untuk Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Indikator Sasaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul yaitu Indeks Pendidikan, Umur Harapan Hidup, dan Indeks Pembangunan Gender.

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kubutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial,

dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang populer dengan pembangunan manusia. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup variabel inti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Di Sumatera Utara, IPM tertinggi adalah Ibu Kota Sumatera Utara yakni Kota Medan dengan IPM sebesar 83,23 dengan IPM kategori “sangat tinggi”. Sedangkan posisi selanjutnya adalah Kota Pematang Siantar yang juga masuk dalam IPM kategori “sangat tinggi”. Sedangkan Kota Gunungsitoli masih tergolong ke dalam kategori “tinggi”.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara, maka Kota Gunungsitoli dengan IPM 72,30 berada pada posisi ke 29 dari 33 kabupaten/kota dan masih berada dibawah IPM Sumatera Utara yang mencapai 75,76. Namun bila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota se kepulauan Nias, IPM Kota Gunungsitoli adalah yang tertinggi, diikuti dengan Kabupaten Nias Utara, Nias, Nias Selatan, dan terakhir Nias Barat.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan (UHH) saat lahir. Umur Harapan Hidup Kota Gunungsitoli tahun 2024 yaitu 74,23 tahun. Hal ini berarti rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 dapat hidup hingga mencapai usia 74 sampai 75 tahun. Umur harapan hidup tertinggi di Sumatera Utara yaitu Kota Medan yang mencapai 75,09 tahun, dan terendah yaitu Kabupaten Padang Lawas 71,67 tahun.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah Kota Gunungsitoli yakni 13,79 tahun. Sedangkan Kota Medan memiliki HLS tertinggi mencapai 14,79 tahun sementara Asahan dan Serdang Bedagai memiliki HLS terendah hanya 12,65 tahun.

Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Gunungsitoli bersekolah selama 8,76 tahun atau hanya mencapai SMP kelas 2 atau 3 pada tahun 2024. Angka ini masih jauh disbanding angka RLS Sumatera Utara yakni 9,93 tahun, dan kembali menghantarkan Kota Gunungsitoli pada posisi rendah, yakni tujuh terbawah. Hal ini tentu harus

menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah agar anak-anak dapat meningkatkan pendidikannya.

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) yang disesuaikan. Rata-rata PPP Kota Gunungsitoli sebesar 9,056 Juta Rupiah per tahun. Angka ini berada jauh dibawah rata-rata Sumatera Utara yaitu sebesar 11,46 Juta Rupiah. Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara, pengeluaran perkapita di Kota Gunungsitoli tahun 2024 menduduki peringkat ke 28. Pengeluaran per kapita tertinggi di Kota Medan mencapai 16,069 Juta Rupiah per kapita per tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Nias Barat yang hanya 6,74 Juta Rupiah per kapita per tahun.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Misi kedua yaitu Memperkuat Perekonomian Yang Berbasis Sumber Daya Lokal. Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian berbasis pada potensi sumber daya lokal. Dalam misi ini akan memberikan perhatian pada peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, penciptaan iklim usaha yang kondusif, pengembangan potensi pertanian dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM dan pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Berdasarkan pendekatan produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,36%, diikuti oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,47%, serta lapangan usaha jasa keuangan sebesar 3,98%. Tiga lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB Kota Gunungsitoli yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 27,15%, lapangan usaha kontruksi sebesar 20,17%, serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,89%.

Bila dilihat dari pendekatan pengeluaran, komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,47% disusul komponen impor sebesar 3,86% dan komponen ekspor sebesar 3,55%. Berdasarkan pendekatan pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah

tangga memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 67,50%, menyusul komponen impor sebesar 32,46% dan komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 29,69%.

3. Indeks Gini

Indikator kedua yang digunakan untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian sektor unggulan adalah Indeks Gini yang kemudian dijabarkan dengan sasaran strategis yaitu: meningkatnya aktifitas perekonomian sektor unggulan, menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya masalah kesejahteraan sosial, dan meningkatnya kemandirian desa.

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Gunungsitoli, kondisi ketimpangan di Kota Gunungsitoli lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2024, Indeks Gini di Kota Gunungsitoli mencapai 0,27, sementara di Provinsi Sumatera Utara indeks gini menyentuh angka 0,29.

4. Persentase Penduduk Miskin

Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan Kota Gunungsitoli mengalami penurunan sebesar 0,06% poin yaitu dari 14,78% pada maret 2023 menjadi 14,72% pada maret 2024. Angka kemiskinan ini setara dengan 22,16 ribu jiwa pada maret 2024 atau meningkat sekitar 130 jiwa dalam satu tahun terakhir.

Pada maret 2024, garis kemiskinan Kota Gunungsitoli secara total sebesar Rp. 493.644 per kapita per bulan sedangkan pada Maret 2023 garis kemiskinan Kota Gunungsitoli sebesar Rp. 459.787 per kapita per bulan.

Pada periode maret 2023-maret 2024, baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. P1 turun dari 2,08 pada maret 2023 menjadi 1,99 pada maret 2024, sementara P2 turun dari 0,46 menjadi 0,38. Turunnya P1 mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin yang mampu mengikuti peningkatan garis kemiskinan, atau dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Selanjutnya turunnya P2 yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran konsumsi diantara penduduk miskin atau dengan kata lain penyebaran pengeluaran konsumsi semakin baik atau merata.

5. Laju Inflasi

Pada Desember 2024, terjadi Inflasi Kota Gunungsitoli sebesar 3,10% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,58%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok pendidikan sebesar 10,26%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 9,43%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,72%, kelompok kesehatan sebesar 3,92%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,74%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,34%, kelompok transportasi sebesar 2,88%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,66%, dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,40%.

Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,56%.

Tingkat inflasi pada Desember 2024 sebesar 1,47% dan tingkat inflasi Kota Gunungsitoli bulan Desember 2024 sebesar 3,10%.

6. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 32 komponen, mulai dari manajemen perubahan di

lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Gunungsitoli memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai B yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pencapaian indikator ini telah mencapai target, bahkan indeks reformasi birokrasi pemerintah Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.

7. Indeks Harmoni Sosial

Indikator yang digunakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, religius, dan berbudaya adalah Indeks Harmoni Sosial yang kemudian dijabarkan dengan sasaran strategis yaitu: meningkatnya ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat serta terciptanya masyarakat yang berkarakter berbasis nilai budaya lokal.

Indeks Harmoni Sosial Pemerintah Kota Gunungsitoli diperoleh dari penjumlahan Indeks Ketentraman dan Ketertiban ditambah Indeks Budaya Lokal dibagi 2.

$$\begin{aligned}\text{Indeks Harmoni Sosial} &= (\text{Indeks Ketentraman dan Ketertiban} + \text{Indeks Budaya Lokal}) / 2 \\ &= (85 + 67,87) / 2 \\ &= \mathbf{76,43}.\end{aligned}$$

Rencana dan realisasi capaian indikator indeks harmoni sosial menunjukkan kinerja yang sudah baik. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator sebesar 102,3% dari target tahun 2024 yang telah ditetapkan. Capaian kinerja terhadap target indeks harmoni sosial yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 74,68 dengan realisasi sebesar 76,43.

8. Tingkat Pembangunan Infrastruktur

Indikator yang digunakan untuk mewujudkan penyediaan infrastuktur yang berkeadilan, berkualitas, dan berwawasan lingkungan adalah tingkat pembangunan infrastruktur yang kemudian dijabarkan dengan sasaran strategis, yaitu: meningkatnya infrastruktur dan prasarana wilayah, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dan meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana.

Tingkat Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Kota Gunungsitoli diperoleh dari rata-rata 8 indikator, yaitu:

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Rumah Layak Huni	81,02%	81,03%	100,01%
2	Persentase Kawasan Perkotaan Non Kumuh	98,75%	98,89%	100,14%
3	Persentase Penduduk Mengakses Air Minum Layak dan Aman	35,03%	34,83%	99,42%
4	Persentase Penduduk Mengakses Sanitasi Layak dan Aman	33,97%	33,59%	98,88%
5	Persentase Jalan Mantap	65,70%	65,77%	100,10%
6	Persentase Daerah Irigasi Terlayani Jaringan Irigasi	38,87%	39,60%	101,87%
7	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	76,00%	78,79%	103,67%
8	Persentase Sarana Perhubungan Kondisi Baik	25%	26,59%	106,36%
		Total	57,38%	96,77%

Dari tabel di atas dapat dilihat, rencana dan realisasi capaian indikator tingkat pembangunan infrastruktur menunjukkan kinerja yang belum maksimal. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator sebesar 96,77% dari target tahun 2024 yang telah ditetapkan. Capaian kinerja terhadap target tingkat pembangunan infrastruktur yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 59,22% dengan realisasi sebesar 57,38%.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

APBD Kota Gunungsitoli pada Tahun 2024 untuk anggaran pendapatan sebesar Rp. 774.508.269.021 dan belanja sebesar Rp. 736.472.621.463. Komposisi APBD Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.5 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pagu anggaran pada Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 769.383.217.929 dan teralisasi sebesar Rp 739.376.035.908 atau tercapai sebesar 96,10% dari target yang telah ditetapkan. Komponen Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 terdiri atas:

- 4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 46.971.727.675 dan terealisasi sebesar Rp 23.906.167.796 atau tercapai sebesar 50,89%.
- 5) Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp. 709.427.071.536 dan terealisasi sebesar Rp 703.441.933.340 atau tercapai sebesar 99,16%.

- 6) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target anggaran sebesar Rp 12.984.418.717 dan teralisasi sebesar Rp 12.027.934.772 atau tercapai sebesar 92,63%.

Komponen Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2024 tidak lagi mengenal Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019. Komponen Belanja APBD Perubahan Kota Gunungsitoli Tahun 2024 terdiri dari:

- 5) Belanja Operasional dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 517.064.601.373 dan terealisasi sebesar Rp 481.835.639.087 atau tercapai sebesar 93,19%.
- 6) Belanja Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 124.100.532.042 dan terealisasi sebesar Rp 122.329.502.180 atau tercapai sebesar 98,57%.
- 7) Belanja Tidak Terduga dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 0.
- 8) Belanja Transfer dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 133.243.135.605 dan terealisasi sebesar Rp 132.307.480.196 atau tercapai sebesar 99,30%.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
A	Pendapatan Daerah	Rp 769.383.217.929	Rp 739.376.035.908	Rp 30.007.182.021	96,10%
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 46.971.727.675	Rp 23.906.167.796	Rp 23.065.559.879	50,89%
	Pendapatan Transfer	Rp 709.427.071.536	Rp 703.441.933.340	Rp 5.985.138.196	99,16%
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 12.984.418.717	Rp 12.027.934.772	Rp 956.483.945	92,63%
B	Belanja Daerah	Rp 774.508.269.021	Rp 736.376.035.908	Rp 38.035.647.558	95,09%
	Belanja Operasional	Rp 517.064.601.373	Rp 481.835.639.087	Rp 35.228.962.286	93,19%
	Belanja Modal	Rp 124.100.532.042	Rp 122.329.502.180	Rp 1.771.029.862	98,57%
	Belanja Tidak Terduga	Rp 100.000.000	-	Rp 100.000.000	0%
	Belanja Transfer	Rp 133.243.135.605	Rp 132.307.480.196	Rp 935.655.409	99,30%
C	Pembiayaan Daerah (Netto)	Rp 5.125.051.091	Rp 3.740.134.804	Rp 1.384.916.287	72,98%
	Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.125.051.091	Rp 3.740.134.804	Rp 1.384.916.287	72,98%

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 774.508.269.021 yang digunakan untuk membiayai Belanja Daerah.

F. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Penyelenggaraan pemerintahan oleh Kota Gunungsitoli telah melalui perencanaan yang cukup komprehensif dimana penentuan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan anggaran yang dimiliki. Program dan kegiatan juga telah dipetakan dalam rangka mendukung tercapainya target sasaran strategis. Jumlah keseluruhan program kegiatan di Tahun 2024 yang mendukung capaian sasaran strategis sebanyak 90 program sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Jumlah Program Kegiatan per indikator kinerja sasaran strategis Kota Gunungsitoli Yang Didukung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah Program
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	1
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	3
3	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	7
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Unggulan	1. PDRB Per Kapita	2
		2. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	9
		3. Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	4
		4. Nilai Investasi	2
		5. Tingkat Pengangguran Terbuka	3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Jumlah Program
1	2	3	4
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	1
6	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Tertangani	2
7	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	2
8	Meningkatnya Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Persentase Jalan Kondisi Baik	3
		Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan	1
		Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	7
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7
10	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana Yang Tertangani	2
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota	1
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	3
		Nilai SAKIP	8
		Indeks Profesionalitas ASN	2
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	4
13	Meningkatnya Digitalisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2
14	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	5
15	Terciptanya Masyarakat Yang Berkarakter Berbasis Nilai Budaya Lokal	Indeks Budaya Lokal	9
TOTAL			90

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan kemampuan perencanaan sistematis dengan menggunakan alat tolak ukur yang dapat mengukur semua arena akan dapat mendorong interaksi antar arena. Hal ini adalah kunci reformasi birokrasi. Selain itu, kunci penting keberhasilan didalam akuntabilitas kinerja adalah optimalisasi keterlibatan dan komunikasi antar pemangku kepentingan yang luas sehingga program yang demikian beragam dan ekstensif dapat berjalan selaras dan berinteraksi secara seimbang. Jika hal ini dapat berjalan, maka visi misi yang telah ditetapkan dalam koridor kepentingan rakyat dapat tercapai. Keberagaman program kegiatan di Tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagai upaya mewujudkan visi misi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Program Pendukung Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas dan Akses Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 2. Program perlindungan perempuan 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 4. Program Perlindungan Khusus Anak 5. Program pengendalian penduduk 6. Program pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7. Program pemberdayaan dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	
1	2	3	4	
			peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
4	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Sektor Unggulan	PDRB Per Kapita	1. Program perencanaan dan pembangunan industri	
			2. Program hubungan industrial	
		Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	1. Program pengelolaan perikanan tangkap	
			2. Program pengelolaan perikanan budidaya	
			3. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	
			4. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	
			5. Program penyuluh pertanian	
			6. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
			7. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	
			8. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	
			9. Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha perdagangan	1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
				2. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
				3. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
4. Program pendidikan dan latihan perkoperasian				
Nilai Investasi	1. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			
	2. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	2	3	4
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 2. Program pengembangan UMKM 3. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Program pemberdayaan sosial
6	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS Yang Tertangani	1. Program rehabilitasi sosial 2. Program perlindungan dan jaminan sosial
7	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	1. Program penataan desa 2. Program peningkatan kerjasama desa 3. Program administrasi pemerintahan desa 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
8	Meningkatnya Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Persentase Jalan Kondisi Baik	1. Program penyelenggaraan jalan 2. Program pengembangan jasa konstruksi 3. Program penyelenggaraan penataan ruang
		Persentase Ketersediaan Fasilitasi Sarana Perhubungan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
		Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan	1. Program Pengembangan Tanah Kosong 2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 3. Program penataan bangunan dan lingkungannya 4. Program penataan bangunan gedung 5. Program peningkatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	2	3	4
			<p>prasarana, sarana, dan utilitas umum</p> <p>6. Program penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</p>
9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</p> <p>2. Program Pengelolaan persampahan</p> <p>3. Program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup</p> <p>4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</p> <p>5. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)</p> <p>6. Program pengelolaan keanekaragaman hayati</p> <p>7. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</p>
10	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	<p>Persentase Bencana Yang Tertangani</p> <p>Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota</p>	<p>1. Program penanggulangan bencana</p> <p>2. Program penanganan bencana</p> <p>Program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</p>
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<p>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Nilai SAKIP</p>	<p>1. Program pengelolaan keuangan daerah</p> <p>2. Program pengelolaan barang milik daerah</p> <p>3. Program pengelolaan pendapatan daerah</p> <p>1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	2	3	4
			2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 3. Program perekonomian dan pembangunan 4. Program penyelenggaraan pengawasan 5. Program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi 6. Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah 7. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 8. Program penelitian dan pengembangan daerah
		Indeks Profesionalitas ASN	1. Program kepegawaian daerah 2. Program pengembangan sumber daya manusia
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	1. Program pembinaan perpustakaan 2. Program pendaftaran penduduk 3. Program pengelolaan arsip 4. Program penyelenggaraan statistik sektoral
13	Meningkatnya Digitalisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Program informasi dan komunikasi publik 2. Program aplikasi informatika
14	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
1	2	3	4
			ekonomi, sosial, dan budaya
			5. Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
15	Terciptanya Masyarakat Yang Berkarakter Berbasis Nilai Budaya Lokal	Indeks Budaya Lokal	<p>1. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</p> <p>2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</p> <p>3. Program pengembangan kapasitas kepramukaan</p> <p>4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya</p> <p>5. Program pengelolaan permuseuman</p> <p>6. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</p> <p>7. Program pemasaran pariwisata</p> <p>8. Program pengembangan sumber pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>9. Program pengembangan kebudayaan</p>





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB IV PENUTUP

LKIP Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Pemerintah Kota Gunungsitoli selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis RPJMD dan Perjanjian Kinerja Wali Kota Gunungsitoli Tahun 2024. Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis RPJMD lebih dari 100%. Dari 24 IKU, sebanyak 16 berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen, banyaknya inovasi dan kolaborasi. Sebagian sasaran strategis RPJMD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan yang ditandai oleh 8 target IKU yang tidak tercapai. Pertama adalah 'Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan' yang didorong oleh inflasi. Selanjutnya adalah 'Tingkat pengangguran terbuka' yang didorong oleh perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja. Yang Ketiga yaitu 'Persentase Penduduk Miskin' yang didorong oleh pemenuhan kebutuhan dasar sosial, kesehatan, dan pendidikan yang belum optimal. Keempat adalah 'Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana Perhubungan', Yang Kelima 'Persentase Kawasan Non Kumuh Perkotaan', Yang Keenam 'Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota', Yang Ketujuh 'Nilai SAKIP' dan yang terakhir 'Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik'.

Pemerintah Kota Gunungsitoli pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp 774.508.269.021. Pemerintah Kota Gunungsitoli terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif strategis. Semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Gunungsitoli semakin meningkat sehingga bisa mencapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.